



DIRGAHAYU KORPRI KE-49 TAHUN 2020

“
*Korpri Berkontribusi Melayani
dan Mempersatukan Bangsa*
”



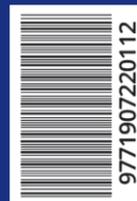
Drs. ADE ARIYANTO, M.Si

Pjs. Bupati Serang



Drs. H. Tb. Entus Mahmud S, M.Si

Sekda Kab. Serang



www.serangkab.go.id

VOL. 54

TRIWULAN 4 | 2020

Dinamika

Mimbar Pembangunan Kabupaten Serang



PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG

SINERGITAS UNTUK PEMBANGUNAN



- Kabupaten Serang **Lepas dari Predikat Pengangguran Tertinggi** di Banten
- **Kopi Produksi Lokal** Laris Hingga Luar Daerah

- Pemkab Serang **Raih Penghargaan** dari Mendagri
- **Pembinaan** Atlet dan Pemuda Terus Dilakukan

TIM REDAKSI

Pelindung/Penasehat :

Bupati Serang
Ketua DPRD Kabupaten
Serang

Penanggung Jawab :

Sekda Kabupaten Serang

Wakil Penanggung Jawab :

Asda II Kabupaten Serang

Pengarah Redaksi :

Anas Dwisatya. P.Sos., M.Si

Redaksi :

Hartono, SE., M.Si
Nur Amrin, S.Pd.
Istiqomat, S.Pd.I.
Dina Marlina, S.Ikom

Fotografer :

Yan Cikal Juliana, SE.

Sirkulasi :

Sadiman

Layouter :

Muhammad Sulfan
Deri Athulloh

Alamat Redaksi :

Diskominfo Kab. Serang
Jl. Veteran No. 1 Serang
Telp. (0254) 200252
Fax. (0254) 201952

Terbit Berdasarkan :

SK Bupati No. 084/Kep.III -
Huk/2004, 02 Januari 2004
ISSN 1907 - 2201 771907
220112

DAFTAR ISI

- 1 Kabupaten Serang Lepas dari Predikat Pengangguran Tertinggi di Banten
- 2 Lima Kali WTP, Pemkab Serang Diganjar Penghargaan KEMENKEU
- 3 Pemkab Serang Raih Penghargaan dari Mendagri
- 4 Enam Program Jadi Prioritas
- 5 Pendapatan Daerah 2021 Ditargetkan Rp 2,6 Triliun
- 6 Pjs Bupati dan Pemkab Serang Bersinergi
- 7 Inspektorat Kabupaten Serang Predikat Sakip Tetap Membanggakan
- 9 Pemkab Serang Serius Tindak Tempat Hiburan Malam
- 10 Objek Wisata di Anyar-Cinangka Terapkan Prokes
- 11 Menteri LHK Tanam Mangrove di Tirtayasa
- 12 Pemkab Serang Kebut Penyerah PSU
- 13 Relokasi 4 SDN Terdampak Jalan Tol Dipercepat
- 15 Kesbangpol Segera Jadi Badan
- 16 Kunjungan Wisatawan Meningkat, Covid-19 Terkendali
- 17 Satgas Kabupaten Serang Bagikan 50 Ribu Masker
- 18 Duta Bahasa Kabupaten Serang Bersaing di Nasional
- 19 Kopi Produksi Lokal Laris Hingga Luar Daerah
- 20 175 Ton Beras dibagikan ke Nelayan
- 21 Kejar Target Isbat Nikah 2.000 Pasangan, Perkuat Pendampingan Korban KDRT
- 22 Konsisten Wujudkan Target Perda, Semua Jalan Jadi Prioritas
- 23 DPKD Optimalkan Kegiatan Silang Layan di Tengah Pandemi
- 24 RPJMD 2022-2026 Disiapkan
- 25 Pemkab Serang Maksimalisasi Keterbukaan Informasi
- 26 Pemkab Kirim Bantuan Bagi Warga Isolasi Mandiri
- 27 Ribuan Rutilahu Diperbaiki, Bangun Puluhan Sarana Pendidikan
- 28 LKBA Kabupaten Serang Dorong Warga Mandiri Ekonomi dan Kesehatan
- 29 MUI Kabupaten Serang Serukan Aksi Damai
- 30 Satgas Covid-19 Sosialisasi 3M di Lembaga Pendidikan
- 31 Pemkab Serang Sosialisasikan Pilkada
- 32 Penyaluran BLT DD Berjalan Lancar
- 33 DPMPSTP Lakukan Terobosan, Target Pendapatan Tercapai
- 35 KPU Diminta Datangi Pemilih Lansia
- 36 Pembinaan Atlet dan Pemuda Terus Dilakukan
- 37 BKPSDM Gunakan Aplikasi SIMPEG
- 38 Sekda Serukan Gerakan Berbagi
- 39 BPKAD Terus Berinovasi Optimalkan Kinerja
- 40 Sepuluh Calon Barista Dilatih
- 41 Pemkab Serang Terima Hibah Rehab Lima SD
- 43 BPBD Jadi Rujukan BNPB Pusat
- 45 Ratusan Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh
- 46 Ratusan Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh
- 46 SKB CPNS Kabupaten Serang Terapkan Protokol Kesehatan
- 47 Antisipasi Banjir, Pemkab Serang Siap Sukseskan Program FMSRB
- 48 Musim Penghujan, Sekda Minta Edukasi Masyarakat
- 49 Bapenda Optimis Target Tetap Tercapai
- 50 Amankan SPBE, Pemkab Serang Perkuat Bug Bounty Program
- 51 Wujudkan SPBE, Pemkab Serang Percepat Transformasi Digital
- 52 Tunjang SPBE, Pemkab Serang Tingkatkan SDM ASN
- 53 Kuli Bangunan
- 56 Tips Bersepeda Jarak Jauh Untuk Pemula

SALAM REDAKSI

KABUPATEN SERANG



SINERGITAS Untuk Pembangunan

Agenda pembangunan pemerintah tentu membutuhkan sinergitas yang kuat. Supaya, proses pembangunan dapat terintegrasi, terukur, dan terarah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang selalu meningkatkan sinergitas dalam setiap agenda pembangunan. Baik antar organisasi perangkat daerah (OPD) maupun dengan instansi lainnya.

Agenda pembangunan yang disinergikan akan menghasilkan output yang baik. Sehingga, antar OPD, antar instansi dapat saling mendukung dan tidak ada program yang bertahakan satu sama lain.

Terlebih lagi dalam upaya peningkatan indeks manusia (IPM) yang meliputi tiga program besar. Yakni, soal peningkatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Upaya peningkatan IPM ini tentu dilakukan secara bersama dengan seluruh OPD. Seperti di bidang

pendidikan, semua OPD terlibat bukan hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik dari segi pemenuhan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur pendidikan, dan pemenuhan lainnya yang dikerjakan dengan bersama. Begitu pun di bidang kesehatan, daya beli masyarakat dan yang lainnya.

Sinergitas yang dilakukan oleh Pemkab Serang sudah menuai hasil yang membanggakan. Seperti raihan wajar tanpa pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, hingga penilaian sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang membanggakan.

Dalam beberapa kesempatan, Pemkab Serang juga selalu bersinergi dengan instansi vertikal lainnya. Seperti dengan instansi TNI-Polri. Terutama, dalam rangka menangani Covid-19, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hingga penyelenggaraan Pilkada. Selamat membaca.!



Lima Kali WTP, Pemkab Serang Diganjar Penghargaan KEMENKEU

Kabupaten Serang Lepas dari Predikat Pengangguran Tertinggi di Banten

Predikat angka pengangguran tertinggi di Banten yang disandang Kabupaten Serang sejak tahun 2012 akhirnya terlepas. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis per Agustus 2020, mencatatkan Kabupaten Serang berada di posisi keenam tingkat pengangguran dari delapan kabupaten/kota.

Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, tingkat pengangguran Banten per Agustus 2010 sebesar 10,64 persen atau sebanyak 661 ribu orang. Meningkat 2,53 persen atau bertambah sebanyak 171 ribu orang dibandingkan Agustus 2019.

Sementara berdasarkan delapan kabupaten/kota, pengangguran tertinggi terjadi di Kabupaten Tangerang sebesar 13,06 persen, disusul Kota Cilegon 12,69 persen, dan Kabupaten Serang 12,22 persen. Kemudian Kabupaten Lebak 9,63 persen, Kota Serang 9,26 persen, Kabupaten Pandeglang 9,15 persen, Kota Tangerang 8,63 persen, dan Kota Tangerang Selatan 8,48 persen.

Melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jumat (6/11/2020), Kepala BPS Banten, Adhi Wiriana mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak pada penurunan perekonomian, termasuk angka pengangguran. Setidaknya, terdapat 1,84 juta orang yang terdampak Covid-19 atau 19,18 persen.

Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 205 ribu orang dan bukan angkatan kerja 28 ribu orang. "Sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 103 ribu orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 1,51 juta orang," tandas Adhi.

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kerja (Binapenta) Disnakertrans Kabupaten Serang Ugun Gurmilang mengatakan, dari sisi ketenagakerjaan, dampak Covid-19 cukup terasa. Atas intruksi dan arahan pimpinan daerah, Disnakertrans berusaha menekan dampak covid-19.

"Agar tidak berdampak parah terhadap ketenagakerjaan, dan Alhamdulillah beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Serang di masa pandemi covid-19 ini masih ada perekrutan tenaga kerja. Walaupun di sisi lain ada perusahaan yang melakukan PHK," ujarnya

Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan hingga Kepala Daerah sudah membuat surat edaran terkait pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19. "Bupati Serang pun rutin menggelar rapat koordinasi dengan pihak industri dalam upaya pencegahan dampak negative covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan dan pekerja," ujarnya. (Amrin)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang diganjar piagam penghargaan tropi atau plakat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi yang telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Perwakilan Provinsi Banten lima kali secara berturut-turut.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Wimpie Defianto kepada Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Serang, Ade Ariyanto di pendopo bupati pada Senin, 26 Oktober 2020. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah (Sekda) Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang Rahmat Jaya, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang.

Opini WTP merupakan penilaian terbaik atas laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK RI. Dengan meraih penilaian tersebut, dapat dipastikan pengelolaan keuangan di Pemkab Serang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Capaian opini WTP tentu tidak terlepas dari campur tangan pimpinan daerah yang menjabat. Kemudian, juga atas kerjasama yang dijalin antar pejabat di Pemkab Serang. Sehingga, laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK RI dapat dilakukan tanpa ada kekurangan.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan, Wimpie Defianto mengatakan, penyerahan penghargaan yang dilakukan pihaknya mewakili Kementerian Keuangan sebagai bentuk apresiasi kepada Pemkab Serang.

"Penghargaan ini atas prestasi Kabupaten Serang meraih Opini WTP BPK RI Perwakilan Provinsi Banten hasil LHP Tahun 2019," ujar Wimpie kepada wartawan usai penyerahan.

Akan tetapi, sabut Wimpie, ada yang lebih membanggakan yakni dengan Raihan Opini WTP BPK RI Perwakilan Provinsi Banten diperoleh lima kali secara berturut-turut meski Pemkab Serang sembilan kali meraih Opini WTP. "Ini sudah 5 kali berturut-turut (meraih opini WTP) sehingga

Kabupaten Serang mendapatkan plakat (tropi) dari Kementerian Keuangan," terangnya.

Wimpie memastikan, jika mendapatkan Opini WTP selama lima tahun berturut-turut dan menerima plakat dari Kementerian Keuangan diartikan semakin membaik tata kelola pelaporan keuangannya. "Tidak akan pernah mendapatkan penghargaan plakat dari Kementerian Keuangan kalau tata kelolanya tidak semakin membaik. Laporan keuangan yang disusun sudah sangat akuntabel sesuai dengan kaidah akuntansi yang ada," jelasnya.

Pihaknya berkeinginan, dengan raihan Opini WTP BPK RI Perwakilan Provinsi Banten dan penghargaan dari Kementerian Keuangan Pemkab Serang terus mempertahankannya. "Ini tidak terlepas dari kerja keras jajaran Pemkab Serang," tuturnya.

Sekda Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengaku bersyukur atas penghargaan yang diperoleh Pemkab Serang dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian keuangan. "Tentunya ini merupakan hasil jerih payah semua teman-teman OPD, ASN yang dalam prosesnya merasakan tantangan dan hambatan. Tapi dengan kerja keras dan menghasilkan yang baik, hari ini kita mendapatkan kebahagiaan," ujarnya.

Untuk selanjutnya, Entus berharap kepada para kepala OPD untuk terus mempertahankan prestasi ini. Meski saat ini, sebutnya, adanya perubahan dan tata kelola keuangan Simral atau Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan berubah melalui SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah. OPD atau ASN tidak boleh lelah, meski ada perubahan aturan tata kelola keuangan yang tadinya menggunakan Simral ke SIPD. Terus kita upayakan," ajak Entus.

Senada disampaikan Pjs Bupati Serang, Ade Ariyanto. Kata Ade, meski Pemkab Serang sembilan kali meraih Opini WTP BPK RI namun penghargaan dari Kementerian Keuangan hanya lima kali yang secara berturut-turut.

"Kami sangat bersyukur atas piagam ini. Ini suatu penghargaan yang luar biasa, bisa di lihat daerah lain yang mendapatkan piagam segitiga ini bisa terhitung. Ini kategori 5 kali berturut-turut Raihan WTP tanpa catatan, Insya Allah semua OPD terkait termotivasi lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan. Intinya hari ini kita sangat bersyukur nikmat ini dengan bekerja lebih baik lagi," tuturnya. (Amrin)

Pemkab Serang Raih Penghargaan dari Mendagri



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meraih penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2018 yang dinilai sudah baik.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, Masaputro Delly diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri di Pendopo Bupati pada Jum'at, 6 November 2020.

Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Masaputro Delly mengatakan, bahwa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pemberian penghargaan atas LPPD biasanya dilakukan secara nasional dan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Namun, disebabkan pandemi covid-19 akhirnya Mendagri mendelegasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat.

"Jadi ini adalah bentuk apresiasi dari Mendagri terhadap kinerja penyelenggaraan pemda yang setiap tahun pemda melaporkan namanya LPPD,

nah ini adalah LPPD tahun 2018 yang di evaluasi tahun 2019," ujar Delly usai menyerahkan penghargaan.

Atas nama Pemprov Banten bersyukur, dimana Kabupaten Serang atas LPPD mendapatkan prestasi yang sangat tinggi dari Mendagri. "Atas prestasi tersebut, Mendagri memberikan penghargaan untuk lingkup Provinsi Banten Kabupaten Serang mendapatkan peringkat kedua setelah Kota Tangerang," terang Delly.

Hadir turut mendampingi Sekda Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri yakni Asisten Daerah (Asda) I Bidang Administrasi Pemerintahan, Nanang Supriatna dan Inspektur Kabupaten Serang, Rahmat Jaya.

Sekda Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri bersyukur Pemkab Serang atas LPPD dengan mendapatkan penghargaan kinerjanya sangat tinggi dari Mendagri. "Ini tentu sangat menggembirakan," katanya.

Pihaknya juga meminta kepada seluruh jajaran pejabat Pemkab Serang untuk terus mempertahankan capaian yang diraih. Menurutnya, pelaksanaan pemerintahan yang baik akan menghasilkan program yang baik pula untuk kesejahteraan masyarakat. "Sekali lagi ini prestasi yang membanggakan untuk semua perangkat daerah Kabupaten Serang," ujar Entus. (Qomat)



Enam Program Jadi Prioritas

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Serang Ade Ariyanto menyampaikan rancangan APBD 2021. Ada enam program yang direncanakan menjadi prioritas pada tahun 2021.

Hal itu disampaikan Ade saat menyampaikan nota keuangan rancangan APBD 2021 pada rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Serang, Senin (9/11/2020).

Ade mengatakan, rancangan APBD 2021 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang harus selaras sebagai penjabaran atas rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021. Yakni, dalam mewujudkan cita-cita yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah.

Ia menjabarkan, prioritas pembangunan difokuskan kepada enam program. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, berahlak mulia, dan berbudaya, serta kesejahteraan sosial masyarakat. Kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana,

prasarana, dan fasilitas pelayanan dasar.

Ketiga, peningkatan kualitas, penataan ruang permukiman, pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Keempat, peningkatan kualitas, pemerataan, dan daya saing perekonomian. Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan yang prima.

Selanjutnya, prioritas yang keenam yakni peningkatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ade mengatakan, prioritas pembangunan daerah tersebut sasaran utama yang dikedepankan adalah dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Serang. Selanjutnya, dirumuskan dalam rancangan APBD melalui program kegiatan yang ada di masing-masing OPD. (Amrin)



Pendapatan Daerah 2021 Ditargetkan Rp 2,6 Triliun

Pemkab Serang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,676 triliun. Kemudian, target belanja daerah ditargetkan Rp2,807 triliun.

Hal itu terungkap pada rapat paripurna penyampaian Raperda APBD 2021 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang, Senin (9/11). Pengantar nota keuangan rancangan APBD 2021 disampaikan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Serang Ade Ariyanto.

Ade menyampaikan, secara garis besar, estimasi pendapatan daerah sebesar Rp2,676 triliun. Terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp731,194 miliar, pendapatan transfer daerah Rp1,898 triliun, dan pos pendapatan daerah lainnya yang sah Rp45,932 miliar.

Secara rinci, ia menjabarkan sumber PAD terdiri atas pajak daerah Rp427,635 miliar, retribusi daerah Rp33,191 miliar, dan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp20,076 miliar. "Kemudian, untuk pendapatan transfer terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1,7 triliun dan pendapatan tranfer antar daerah Rp198,798 miliar," katanya.

Untuk target belanja, lanjut Ade, meliputi pos belanja meliputi belanja operasional Rp2,232 triliun, belanja modal Rp17,416 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp446,341 miliar.

Atas estimasi itu, kata Ade, terjadi defisit anggaran Rp130,667 miliar. Namun, dapat tertutupi dengan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp130,667 miliar. "Sehingga kekurangan pembiayaan dapat tertutupi oleh Silpa tahun sebelumnya," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum mengatakan, nota keuangan yang disampaikan hanya gambaran secara keseluruhan saja. Akan tetapi, pihaknya akan membahas draft tersebut di internal DPRD. "Nanti akan dibahas melalui komisi-komisi melibatkan OPD mitra kerja," katanya.

Ia mengatakan, dalam penyusunan program kerja 2021, pihaknya akan melihat skala prioritas. Terutama, hasil reses anggota DPRD yang menjadi aspirasi masyarakat. "Kalau saat ini kita belum bisa memastikan mana yang prioritas, karena harus dibahas terlebih dahulu," pungkasnya. (Qomat)



Pjs Bupati dan Pemkab Serang Bersinergi

Pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Serang, jabatan Bupati Serang diisi oleh penjabat sementara (Pjs) yang berasal dari pejabat Pemprov Banten yakni Ade Ariyanto. Ade yang juga menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten bersinergi dengan jajaran pejabat Pemkab Serang dalam menjalankan tugasnya sebagai Pjs Bupati Serang.

Hari pertama kerja, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Serang, Ade Ariyanto melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama pejabat eselon II, para kepala bagian (kabag) dan camat se-Kabupaten Serang di Aula Tb. Suwandi pada Senin, 28 September 2020. Rakor difasilitasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri.

Pjs Bupati Serang, Ade Ariyanto mengatakan, bahwa untuk yang pertama pihaknya memastikan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik serta menjaga keamanan di masyarakat. "Saya bersama Pak Sekda betul-betul menjaga itu," ujarnya.

Yang sangat terpenting rakor yang dilakukan saat ini, sebut Ade, akan fokus pada penanganan covid-19. Sebab, kata dia, tidak ada kegiatan yang lebih penting bagaimana mengajak masyarakat agar disiplin dalam menerapkan 3 M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Sekarang akan kita pertahankan semua program dalam penanggulangan covid-19. Kita akan terus merazia pusat keramaian, tidak ada tawar menawar dalam penegakan disiplin, tujuannya tidak lain ingin melindungi masyarakat," tegas Ade.

Disisi lain, pihaknya juga harus meyakinkan kepada penyelenggara pemilih kepala daerah (pilkada) baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa menjalankan tahapannya sesuai dengan jadwal tanpa ada hambatan.

Disamping itu, juga wajib mengikuti aturan protokol kesehatan atau covid-19. "Sehingga pada 9 Desember semua lancar, yang terpenting tingkat partisipasi pemilih meningkat," ungkap Ade.

Meski demikian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten ini belum bisa menargetkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, pada pekan ini pihaknya akan mengonsolidasikan terlebih dahulu dengan penyelenggara baik KPU dan Bawaslu untuk menanyakan bagaimana respon masyarakat terhadap pilkada. "Minggu kedua nanti kita sampaikan berapa target partisipasi pemilih nanti kita sampaikan atas capaian kinerja KPU dan Bawaslu," terang Ade.

Sekda Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri menambahkan, pada momen konsolidasi Pjs Bupati Serang bersama kepala OPD dan para camat yang terutama bagaimana mengatasi covid-19 dengan salah satu upaya bagaimana memaksimalkan koordinasi yang baik dari tingkat OPD sampai kecamatan.

"Saya berharap keberadaan Pjs (Bupati Serang) tidak menurunkan kinerja rekan-rekan OPD dan kecamatan, tidak seperti anak SD tidak ada guru kepala sekolah mereka malas-malasan, tidak bupati dan wakil bupati kinerja menurun. Jangan terpengaruh, kinerja harus tetap ditingkatkan," tukasnya.

Sedangkan terkait penanganan covid-19 yang hingga kini belum diketahui kapan berakhirnya, entus berharap pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tidak menjadi kluster penyebaran covid-19. Akan tetapi, bisa menghasilkan yang partisipatif yang legal.

"Maka, baik penyelenggara KPU, Bawaslu, masyarakat dan dana jajarannya sampai tingkat kecamatan harus mampu menciptakan pilkada yang sehat tidak mengakibatkan penyebaran covid-19 di Kabupaten Serang," harap Entus. (Amrin)

Predikat Sakip Tetap Membanggakan



Drs. Rachmat Jaya, M.Si
Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang

Inspektorat Kabupaten Serang terus melakukan upaya untuk mempertahankan nilai SAKIP yang membanggakan. Beberapa kegiatan dilakukan meskipun di masa pandemi Covid-19. Kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Selain melakukan pendampingan dalam penanganan pandemi Covid-19, kegiatan tahunan Inspektorat di masa pandemi juga tetap berjalan. Sebab Inspektorat juga memiliki program kegiatan tahunan yang menjadi target di tahun ini. Pelaksanaan kegiatan tahunan Inspektorat juga tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

“Untuk kegiatan kami timnya tidak terlalu banyak, kemudian tim di Inspektorat saat bertugas ke lapangan (Ke luar kantor) juga tidak boleh ada kerumunan, tetap harus physical distancing. Termasuk kalau masih bisa dilakukan melalui

teknologi misalnya vcon (Video conference) atau zoom meeting itu kita lakukan untuk mendapatkan informasi saat auditing, terutama teman-teman OPD yang sedang dalam pembinaan dan pengawasan, juga sedang diaudit,” kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang Rachmat Jaya.

Ia mengatakan, beberapa kegiatan Inspektorat di antaranya melakukan audit kegiatan OPD. Itu dilakukan untuk melakukan pembinaan SAKIP yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja Pemkab Serang yang sudah mencapai predikat A atas penilaian KemenPAN RB. “Tentu kita ingin terus menjaga kualitas daripada kinerja atau SAKIP kita, sehingga pembinaan SAKIP nya tetap kita lakukan ke OPD,” ujarnya.

Kemudian, pihaknya juga melakukan pembinaan pengawasan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal di OPD. Tujuannya, untuk meningkatkan maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). “Ini kaitan juga dengan indikator kinerja Inspektorat, diantaranya kapabilitas SAKIP, kemudian maturitas sistem pengendalian internal pemerintah,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kapabilitas bagi pengawas intern, di masa pandemi Covid-19 ini Inspektorat juga tetap melakukan bimbingan teknis melalui zoom meeting. Hal itu tetap dilakukan Inspektorat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi APIP. Inspektorat memiliki pegawai keseluruhan 63 orang terdiri dari auditor 43 orang, pengawas penyelenggara pemerintahan Sembilan orang, sementara lainnya fungsional umum.

“Ke depan kita juga ada auditor kepegawaian atau disebut Audiwar, itu satu orang. Kita membuka



Dokumentasi foto diambil sebelum pandemi covid-19

fungsional auditor yang tugasnya nanti berkaitan dengan pemeriksaan terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang melanggar disiplin, jd ketika ada usulan dari BKPSDM ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti, maka yang menangani pegawai yang indisipliner itu nanti ada auditor kepegawaian. Sebelumnya kita belum ada, itu seleksinya yang dibuka oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara), jadi PNS yang mau ke fungsional itu mengikuti seleksinya, memang ada peluang ke situ. Jadi ada uji kompetensi dulu,” tuturnya.

Ia mengatakan, selain menangani indisipliner ASN, Inspektorat juga menangani pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan berbagai hal. Diantaranya kaitan program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Serang. “Tahun ini pengaduan ada, tapi yang muncul biasanya kaitan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa melalui anggaran alokasi dana desa. Pengaduan alokasi dana desa tahun ini ada sekitar enam. Tapi sudah kita koordinasikan, sudah kita fasilitasi dan sudah ada penyelesaian, penyelesaian itu kan kaitan dengan fisik dilakukan tindakan audit, kemudian ada pengembalian ke kas desa dan sebagainya,” ujarnya.

Penyelesaian temuan-temuan juga sudah dilakukan, untuk temuan, target Inspektorat, itu ketika ada temuan baik yang terkait administrasi, itu berkaitan dengan sistem pengendalian internal, kemudian temuan berkaitan dengan kepatuhan harus segera terselesaikan.

“Pada dasarnya kita 60 hari itu harus sudah selesai. Bahkan teman-teman kita di OPD sekarang ketika sedang dalam pemeriksaan pun kalau ada tindakan yang harus ditindaklanjuti itu sudah ditindaklanjuti langsung, jadi alhamdulillah respon dari teman-teman OPD cukup cepet, maka kita tidak perlu menunggu 60 hari. Sebab pada saat masa pemeriksaan itu sudah selesai di tindaklanjuti. Di LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) kita itu temuan tetap dibuka disitu, tapi kemudian kalau sudah selesai ya kita berikan penjelasan telah selesai ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara untuk menjaga profesionalitas Inspektorat saat menjalankan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Serang juga memiliki sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan, yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016. Dua ISO itu juga dilakukan audit survailant oleh lembaga independen yang berwenang untuk memastikan apakah Inspektorat Kabupaten Serang masih layak dengan sertifikat ISO tersebut. Audit survailant tahun ini merupakan tahun ke dua untuk penerapan tahun ke tiga. “Hal ini bagus, karena sebagai APIP Kabupaten Serang kami juga ada yang mengawasi. Kami juga ingin menjaga kualitas LHP itu sendiri, kami juga ingin menjaga kualitas APIP kita sendiri. Kan kita juga perlu ada arahan, perlu juga ada pengawasan dari luar, jadi penerapan dua SNI ISO itu dalam rangka juga bagaimana Inspektorat bisa dipotret oleh pihak luar,” tutur Rachmat.

Ia mengatakan, Inspektorat menerapkan SNI ISO sistem manajemen mutu dan sistem manajemen anti penyuapan karena Inspektorat sangat rawan, ketika melakukan pemeriksaan bisa saja pemeriksa memainkan hasil pemeriksaan itu karena sesuatu hal, subjektifitas dan sebagainya. Untuk itu, Inspektorat ingin profesionalitas pengawas terjaga.

Pengawas saat bekerja juga terukur. Inspektorat ingin profesionalitas, independensi dan objektifitas para pengawas di Inspektorat juga tetap terjaga. Sehingga kita harus punya komitmen bagaimana menjaga kualitas. Inspektorat Kabupaten Serang juga menjadi yang pertama di Indonesia yang menerapkan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016, sejak tahun 2018. (Qomat)

Pemkab Serang Serius Tindak Tempat Hiburan Malam



Keberadaan tempat hiburan malam di sejumlah wilayah Kabupaten Serang sudah meresahkan masyarakat. Pemkab Serang tidak tinggal diam menyikapi hal itu.

Pemkab Serang melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah melakukan penindakan terhadap tempat hiburan malam tersebut. Bagi Pemkab Serang, tidak ada tawar menawar untuk tempat hiburan malam beroperasi di wilayah Kabupaten Serang.

Dinas Satpol PP Kabupaten Serang pun sudah melakukan penyegelan terhadap tempat hiburan malam di Jalan Lingkar Selatan (JLS), Kecamatan Waringinkurung. Namun, baru beberapa hari, segel itu dilepas oleh pemilik tempat hiburan malam dan mereka beroperasi kembali.

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang Ajat Sudrajat mengatakan, pihaknya saat ini sedang memproses pembuatan laporan atas pengrusakan segel itu. "Kita sedang proses ke sana (tempuh jalur hukum-red), karena itu sudah masuk ranah pidana," katanya, Rabu (4/11/2020).

Ajat mengatakan, pihaknya enggan terburu-buru mengambil langkah hukum untuk menindak tegas para pengusaha hiburan malam itu. "Kita sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena kita ranahnya hanya menegakan Perda saja, kepolisian yang punya ranah pidana," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang Aep Syaefullah mengatakan, tempat hiburan malam tidak boleh beroperasi di wilayah Kabupaten Serang. Karena, tidak ada tempat hiburan malam yang mengantongi izin. Selain menjadi pemicu keresahan masyarakat.

Aep menghargai langkah Pemkab Serang untuk memanggil para pengusaha tempat hiburan malam yang merusak segel. Namun, kata dia, setelah itu harus dilakukan tindakan tegas. "Kalau mereka masih membandel, tutup saja permanen," tegasnya.

Aep mengatakan, pengrusakan segel Dinas Satpol PP itu harus diinvestigasi. Apakah pengrusakan itu dilakukan secara sengaja atau ada hal lainnya. "Kalau ternyata sengaja dirusak, maka sudah ranah pidana, tapi kita juga jangan terburu-buru, khawatir kita diserang balik," ujarnya.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Serang Ade Aryanto mengatakan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu. "Ada 12 pengusaha yang akan kita panggil," katanya.

Ade mengatakan, pemanggilan itu untuk mengklarifikasi soal pengrusakan segel itu. Kemudian, pihaknya juga meminta para pengusaha tempat hiburan malam untuk mengikuti aturan yang berlaku. "Kalau mau buka rumah makan silahkan saja, tapi jangan ada embel-embel lainnya," ucapnya. (Qomat)



Objek Wisata di Anyar-Cinangka Terapkan Prokes

Di masa pandemi Covid-19, tempat wisata di Kabupaten Serang tetap buka, itu untuk menjaga roda ekonomi masyarakat. Namun, tempat wisata tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Satuan Tugas (Satgas) penerapan disiplin dan penegakan prokes penyebaran covid-19 Kabupaten Serang melakukan razia di perhotelan, restoran dan tempat wisata pantai yang ada di Kecamatan Anyar. Berdasarkan hasil razia, satgas memastikan jika semuanya sudah menerapkan protokol Kesehatan.

Asisten Daerah (Asda) I Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Nanang Supriatna menuturkan, berdasarkan hasil razia yang dilakukan mulai dari Hotel Alisa, Hotel Mambruk, Hotel Nuansa Bali, dan Hotel Jayakarta sudah menerapkan 3 M, memakai masker, menyediakan tempat mencuci tangan dan handsanitizer serta menjaga jarak di restorannya.

"Hanya saja para pengunjung atau wisatawan perlu di ingatkan masih ada yang tidak memakai masker, mungkin mereka pikir kalau berada di hotel sekitar udara pantai sudah aman, sehingga mereka tidak memakai masker tapi tidak seperti itu pandemi covid-19 ini belum berakhir," ujar Nanang.

Hal itu disampaikan Nanang disela memimpin razia tepatnya di Hotel Mambruk didampingi Kepala Pelaksana Satgas penerapan disiplin dan penegakan prokes penyebaran covid-19 Kabupaten Serang, Nana Sukmana, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Hamdani, dan Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Dis-kominfo), Hartono pada Sabtu, 17 Oktober 2020.

Disamping itu juga, sebut Nanang, para wisatawan yang berkunjung di tempat wisata pantai banyak kedatangan tidak memakai masker. Alasannya sama, mereka pikir udara pantai aman dari wabah covid-19. "Tapi itu pun sudah di ingatkan oleh tim yang lain, dan mereka para wisatawan mengenakan masker," ujarnya.

Sementara Kepala Pelaksana Satgas penerapan disiplin dan penegakan prokes penyebaran covid-19 Kabupaten Serang, Nana Sukmana mengatakan, bahwa selama pandemi covid-19 belum berakhir pihaknya akan terus gencar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan 3 M sarannya di tempat-tempat keramaian.

"Untuk pelaksanaan razia di pusat keramaian perhotelan, resto, tempat wisata pantai, pasar dan lainnya secara gabungan semua unsur terkait dilakukan empat (4) kali dalam sebulan. Ini dilakukan sudah dari enam bulan yang lalu," ujarnya kepada wartawan.

Nana yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang ini menambahkan, untuk satgas tingkat kecamatan dalam melakukan penegakan disiplin prokes dilakukan setiap hari sampai satgas tingkat desa. "Kami juga melibatkan TNI dan Polri. Jadi, kami tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan masyarakat agar menerapkan 3 M guna mencegah penyebaran covid-19," tegas Nana.

Nana menambahkan, untuk Kabupaten Serang sebelumnya masuk zona merah saat ini menurun menjadi zona oranye. "Kedepan kami berharap menjadi zero atau zona hijau di Kabupaten Serang," tutur Nana.

Pantauan dilokasi, sebelum Satgas penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan (prokes) penyebaran covid-19 Kabupaten Serang menyebar melakukan razia terlebih dahulu menggelar apel di halaman Hotel Mahardika. Pukul 12.00 WIB, Kembali berkumpul dan melakukan apel ditempat yang sama. (Amrin)



Menteri LHK Tanam Mangrove di Tirtayasa

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menanam mangrove di Kecamatan Tirtayasa. Ada 780 ribu batang mangrove yang akan ditanam di atas lahan 78 hektare.

Siti Nurbaya mengatakan, kegiatan penanaman mangrove itu dilakukan melalui program padat karya penanaman mangrove (PKPM). Dalam program ini, kata dia, akan melibatkan masyarakat sebagai penanamnya dan akan diberikan insentif.

"Sehingga ada sekitar 5,9 juta pekerja, para pekerja mangrove ini akan mendapatkan uang Rp80 ribu perhari, langsung dari rekening bank ke rekening mereka," katanya.

Berdasarkan hasil pantauannya di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, lokasi lahan mangrove berada di pojok yang jauh dari pemukiman. Kemudian, kondisinya dipenuhi dengan sampah. "Nanti saya minta Dirjen untuk turun ke lokasi untuk mengecek sampahnya," ujarnya.

Dikatakan Siti Nurbaya, keberadaan hutan mangrove sangat diperlukan di wilayah pesisir. Selain sebagai penahan abrasi, juga untuk menyerap karbondioksida. "Mangrove ini bisa menyerap karbon 30 kali lipat dibandingkan hutan biasa," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Sri Budi Prihasto mengatakan, ada dua kelompok masyarakat yang melakukan penanaman mangrove. Setiap kelompoknya terdiri atas 120 orang.

Ia mengatakan, selama ini pihaknya melibatkan pihak perusahaan untuk ikut serta melakukan penanaman mangrove. Kata dia, sudah ada tiga perusahaan yang terlibat. "Kalau tahun ini program dari kita enggak ada," katanya.

Ketua Kaukus Lingkungan Hidup Serang Raya Anton Susilo mengatakan, di Kecamatan Tirtayasa ada 780.000 batang mangrove yang ditanam. Lahan mangrove yang disediakan seluas 78 hektare. "Jadi perhektare ada 10 ribu mangrove," katanya. (Amrin)



Pemkab Serang Kebut Penyerahan PSU

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kembali menerima fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) empat perumahan di Kecamatan Cikande dan Kecamatan Kramatwatu. Tujuan penyerahan tersebut selain untuk memberikan kepastian hukum terhadap status lahan fasos fasum, juga untuk memberikan jaminan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang Irawan Noor mengatakan, fasos fasum yang diserahkan antara lain untuk di Kecamatan Cikande yakni Puri Terate dan Puri Mas. Menurutnya dua pengembang itu masih eksis dan sangat mendukung untuk dilakukan penyerahan fasos fasum.

Kemudian dua perumahan lagi yakni, Griya Harjatani Permai dan Griya Serdang Indah. Perumahan tersebut dibangun sudah lama sejak 1988, saat ini pengembangnya pun sudah tidak ada. "Ini sudah kita lakukan upaya untuk mencari pengembang, tapi ternyata tidak ketemu, berdasarkan informasi sudah meninggal," kata Irawan kepada wartawan usai serah terima Fasos Fasum 4 perumahan di Pendopo Bupati Serang pada Selasa, 27 Oktober 2020.

Namun kata Irawan bagi perumahan yang sudah diiterlantarkan oleh pengembangnya maka bisa dilakukan penetapan fasos fasum. Hal ini merujuk pada intruksi Bupati dan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). "Tapi tetap walau demikian kita lakukan verifikasi, agar validitasnya tetap dibuktikan di lapangan," ujarnya.

Ia mengungkapkan, proses serah terima fasos fasum perumahan ini masih terus berjalan. Pihaknya pun

berencana pada 5 November akan mengundang 72 pengembang. "Kita inventarisir pengembang mana yang nanti kita minta, bagi yang sudah eksis terbangun minimal 50 persen untuk segera menyerahkan fasos fasumnya, karena ini merupakan kewajiban amanat permendagri dan juga amanat perda," tuturnya.

Irawan menjelaskan perlu diketahui bahwa tujuan dari penyerahan fasos fasum ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap status lahan fasos fasum tersebut. Selain itu, dapat memberikan jaminan pemeliharaan yang bisa berkelanjutan.

"Kalau oleh pengembang terus kan gak mungkin, masa pengembang seumur umur, siapa itu? Ya pemerintah daerah, karena mereka sudah menjadi warga Kabupaten Serang," katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri menambahkan, setelah adanya penyerahan dari pengembang, maka menjadi kewajiban Pemda untuk membangun. Namun ia pun berpesan terhadap fasilitas yang sudah baik agar dijaga oleh Camat, Lurah, RW, RT ataupun para penanggung jawab di perumahan masing-masing.

"Karena tanpa adanya upaya merawat dari kita semua, maka apa yang sudah dibangun dengan susah payah ini tidak akan memberikan manfaat," ujarnya.

Sebelumnya PT. Hamparan Graha Pratama (HGP) juga menyerahkan Fasos Fasum Bumi Ciruas Permai (BCP) 1 dan 2 di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas. Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Serang, Ade Ariyanto dan Direktur PT. HGP, Eman Suherman di pendopo bupati pada Senin, 19 Oktober 2020. (Qomat)



Relokasi 4 SDN Terdampak Jalan Tol Dipercepat

Sebanyak 4 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Serang terdampak pembangunan jalan tol Serang-Panimbang. Ke empat SDN tersebut yakni, SDN Cipete di Kecamatan Kragilan, SDN Inpres, SDN Cilayungguha dan SDN Seba berada di Kecamatan Cikeusul.

Dalam percepatan relokasi ke empat SDN tersebut, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Bahkan, pada tahun 2018 lalu SK (Surat keputusan) penetapan lahan pun sudah ditandatangani oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang mengatakan, karena ada faktor demi keamanan, nyaman dalam proses belajar mengajar siswa ada perubahan lokasi yakni untuk relokasi SDN Cipete di Kecamatan Kragilan. Selain disebabkan kondisi tanah yang bakal memakan dana besar juga akses jalannya pun tidak memadai. Kata dia, lokasinya tidak jauh hanya sekitar 200 sampai 300 meter dari lokasi sebelumnya masih di Desa Cipete, Kecamatan Kragilan.

“SDN Cipete di Kecamatan Kragilan ada perubahan lokasi dan lokasinya kita sudah ada alternatifnya, tinggal kepastian pemilik lahan ini yang akan



difasilitasi kepala desa. Hasil rapat tadi pun sudah disepakati antara Pemda, PPK dan PT. Wika,” ujarnya kepada wartawan usai rapat di Pendopo Bupati Serang pada Rabu, 21 Oktober 2020.

Hadir pada rapat tersebut, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Serang Ade Ariyanto, Asda I, Nanang Supriatna, Asda III Ida Nuraida, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (BPKAD), Fairu Zabadi, Kepala DPUPR Okeu Oktaviana, Kepala DPKPTB Irawan Noor, Sekretaris Disdikbud Aber Nurhadi, Asda



III Ida Nuraida, Camat Kragilan, Epon, Camat Cikeusla Iman Saiman dan beberapa pejabat eselon III di dinas terkait, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, Temmy Saputra dan perwakilan PT. WIKA

Sedangkan untuk tiga SDN di Kecamatan Cikeusul, Entus memastikan meski ada perubahan namun tidak ada kendala yang signifikan. “SDN Seba itu pindah lokasi, tapi tidak ada masalah,” katanya.

Dengan adanya perubahan lokasi relokasi 4 SDN tersebut, Entus juga memastikan akan ada perubahan SK Bupati Serang tentang penetapan lahannya. “Kita percepat bisa selesai tahun ini, dan pihak pelaksana pembangunan Tol Serang-Panimbang yang melaksanakan pembangunan gedung 4 SDN itu, pastinya dibangun lebih bagus berikut akses dan berikut fasilitasnya. Tahun depan kita berharap sudah digunakan KBM 4 SDN itu,” harap Entus.

Sementara PPK Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, Temmy Saputra juga memastikan, akan melakukan peninjauan ulang dan kajian terhadap lokasi lahan yang baru untuk SDN Cipete di Kecamatan Kragilan tersebut. Itu demi keamanan, kenyamanan siswa-siswa dalam proses KBM.

“Disamping itu kalau sudah ada revisi SK Bupati Sernag Insya Allah langsung dilaksanakan pengadaan tanah dan bangunannya, itu legal standing kita. Yang pasti, ini hasil bahasan bersama kalau di kita tidak masalah tapi ada pertimbangan teknis,” ungkap Temmy.

2021 Ditargetkan Sudah Bisa Digunakan

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Serang, Ade Ariyanto meninjau lokasi SDN terdampak tol Serang-Panimbang di Kecamatan Kragilan dan Cikeusul. Hal itu dilakukan guna menentukan titik pasti untuk relokasi empat SDN terdampak tol Serang-Panimbang.

Ade Ariyanto mengatakan, bahwa untuk relokasi SDN terdampak belum bisa disimpulkan titiknya sampai saat ini. Oleh karena itu pada hari ini pihaknya sengaja melakukan survei lokasi untuk melihat beberapa opsi. Salah satu tujuannya kata dia, ingin menyimpulkan bahwa pembangunan sekolah agar cepat dilakukan oleh Wika. Sebab waktu sudah mendesak dan ada beberapa opsi yang disurvei.

“Hari ini turun ke lapangan untuk besok rapat dengan pelaksana jadi tidak dipaparkan di meja saja sudah tahu kondisinya. Beberapa opsi belum disimpulkan untuk referensi rapat kita saja,” ujarnya kepada wartawan dilokasi tepatnya di Desa Cipete, Kecamatan Kragilan pada Selasa, 20 Oktober 2020.

Turut mendampingi Pjs Bupati Serang Ade Ariyanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Kepala DPUPR Okeu Oktaviana, Kepala DPKPTB Irawan Noor, Kepala Disdikbud Asep Nugrahajaya, Asda III Ida Nuraida, Kepala Diskominfo Anas Dwisatya, Sekdisdikbud Aber Nurhadi dan beberapa pejabat eselon III di dinas terkait.

Ade mengatakan, untuk lahan yang sebelumnya di tetapkan sebagai lokasi relokasi empat SDN sebenarnya sudah di SK kan oleh bupati pada tahun 2018. Namun seperti diketahui untuk lahannya ada yang terlalu curam sehingga akan menelan biaya konstruksi yang tinggi.

“Sebetulnya titik awal jadi kesepakatan dan sudah tertuang di SK bupati tapi pas dilihat kita nggak bisa diam saja karena dari cost awal konstruksi saja sudah berapa meter (harus diurug). Memang dari kontur itu memerlukan besi biaya tinggi, akses juga kurang. Saya pikir lahan disini opsi lain masih ada yang kosong yang penting tidak jauh dari pemukiman,” ucapnya.

Oleh karena itu, hasil survei ini semua datanya akan dihimpun untuk mencari opsi yang menguntungkan semua pihak. “Besok rapat putuskan titik a b tidak lama lama habis waktu kita ini sudah Oktober. Kita target 2021 sudah dipakai,” tuturnya.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten ini menargetkan empat gedung sekolah itu sudah bisa selesai pada 2021 dan langsung dipakai. Oleh karena itu pihaknya berupaya mempercepat agar bisa terealisasi. “Besok kita rapat kedua. Mereka juga ingin cepat kita punya target mereka juga punya target, Sama sama kita seiring,” ucapnya. (Amrin)



Kesbangpol Segera Jadi Badan

Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Serang tinggal satu langkah lagi. Saat ini, Pemkab Serang tinggal menunggu persetujuan dari Gubernur Banten.

Kesbangpol sebelumnya merupakan bagian dari Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang. Kemudian, Pemkab Serang mengusulkan Kesbangpol untuk menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) sendiri karena beban kerja yang cukup banyak.

Dengan menjadi OPD sendiri, Kesbangpol dapat lebih leluasa untuk melakukan kinerjanya. Yakni, untuk mengurus soal kesatuan bangsa, menjaga kondusifitas masyarakat, hingga menjamin suasana politik yang kondusif.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, Kesbangpol Kabupaten Serang merupakan satu-satunya di Banten yang masih berstatus bagian. Karena itu, ia menargetkan di 2021 perubahan status ini sudah bisa disahkan. "Dari bawah sudah kita usulkan, sudah ada rancangan yang akan kita lakukan. Sekarang kita sudah pada tahap akhir, tinggal menunggu persetujuan gubernur saja," katanya, Senin (28/9).

Menurut Entus dengan berubahnya struktur

organisasi di Kesbangpol tentunya kewenangan yang lebih luas dibanding sebelumnya. Kemudian, pejabat yang memimpinnya berasal dari eselon II. "Kesbangpol akan lebih kuat, lebih komprehensif di dalam penanganan urusan-urusan kesatuan bangsa. Anggaran juga bisa tersendiri," katanya.

Pihaknya menargetkan segala persiapan pembentukan Kesbangpol sudah selesai tahun ini. Sehingga, sarana prasarana dan anggarannya sudah disiapkan untuk 2021. "Kita tidak ingin terulang seperti Kominfo (menyebut DiskominfoSatik), sudah terbentuk tapi anggarannya masih menginduk ke Setda," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesbangpol Setda Kabupaten Serang Ade Hadhi Sukalta mengatakan, saat ini tahapan perubahan status bagian menjadi badan tersebut sedang diurus oleh Bagian Organisasi Setda. "Infonya sedang menunggu persetujuan gubernur, infonya besok (hari ini-red) ada Biro Administrasi dan Biro Hukum (Pemprov Banten-red) ke Bagian Organisasi," katanya.

Ia mengatakan, Kesbangpol memang sudah seharusnya menjadi bagian. Karena, beban kerja Kesbangpol cukup banyak. "Kemudian juga akan mempermudah kerja Kesbangpol," ujarnya. (Qomat)



Kunjungan Wisatawan Meningkat, Covid-19 Terkendali

Kunjungan wisata di Anyar-Cinangka, Kabupaten Serang mengalami peningkatan signifikan. Selama libur panjang cuti bersama pada 28 Oktober 2020 hingga 1 November 2020, hotel dan pantai terbuka hampir dipenuhi wisatawan.

Anyar-Cinangka memang menjadi objek wisata unggulan Kabupaten Serang. Wisata bahari ini selalu dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah saat akhir pekan dan libur panjang. Di masa pandemi Covid-19, objek wisata menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Jasa Usaha Wisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang Bagja Saputra mengatakan, hasil pantauannya selama libur panjang, kunjungan hotel mencapai 90 persen. Sementara, untuk pantai terbuka mencapai 80 persen.

Ia mengatakan, pengunjung wisata didominasi dari wilayah Tangerang dan Jakarta. Kemudian, kata dia, ada juga wisatawan dari lokal. "Hasil pantauan kami kebanyakan kendaraan pribadi plat B," ujarnya.

Selama libur panjang, kata dia, beberapa hotel ada yang membuka full, beberapa lagi ada yang

membuka sebagian kamarnya. "Beberapa hotel ada yang membatasi pemesanan kamar, karena untuk menghindari Covid-19," terangnya.

Meski terjadinya lonjakan pengunjung, kata dia, akan tetapi arus lalu lintas menuju Anyar-Cinangka masih stabil. Karena, waktu berlibur wisatawan terpecah dalam lima hari. "Libur panjang itu kan bukan satu hari dua hari, jadi kunjungan wisatawan juga terbagi harinya," ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang drg Agus Sukmayadi mengatakan, selama libur panjang kasus Covid-19 di Kabupaten Serang mendatar, tidak ada lonjakan kasus termasuk di objek wisata.

Pihaknya memang sudah melakukan antisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada libur panjang. Di antaranya, dengan menegakan protokol kesehatan di objek wisata, dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan.

Dikatakan Agus, semua objek wisata di wilayah Kabupaten Serang memang diwajibkan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Yakni, untuk membatasi kapasitas ruangan supaya tidak berkerumun, menggunakan masker, dan menyiapkan sarana cuci tangan. (Qomat)

Satgas Kabupaten Serang Bagikan 50 Ribu Masker



Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Serang terus melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Tim yang terdiri dari berbagai instansi pemerintahan dan lembaga vertikal ini intens melakukan upaya pencegahan, penanganan, hingga edukasi masyarakat.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Serang, Ade Ariyanto memimpin Satuan tugas (Satgas) penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan (prokes) penyebaran covid-19 Kabupaten Serang. Razia dilakukan serempak di 29 kecamatan sekaligus launching pembagian 50 ribu masker dengan melibatkan unsur muspika yakni polsek dan koramil.

Pjs Bupati Serang, Ade Ariyanto memastikan dalam mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan 3 M yakni memakai masker, membiasakan mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal satu sampai dua meter tidak akan pernah bosan selama belum ada kepastian pandemi covid-19 hilang. Terlebih, saat ini Kabupaten Serang masuk dalam zona merah sehingga upaya yang dilakukan agar Kembali menjadi zona hijau

“Kita selaku satgas tidak pernah bosan-bosan terus mendisiplinkan masyarakat,” ujar Ade Ariyanto disela memimpin razia di Pasar Baru Anyer Kecamatan Anyer pada Sabtu, 10 Oktober 2020. Sebelumnya, Ade didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang, Nana Sukmana juga memimpin razia di Pasar Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu.

Ade mengatakan, sebelum dilaksanakan penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan

penyebaran covid-19 secara serempak di 29 kecamatan terlebih dahulu melakukan apel di halaman Pendopo Bupati Serang. Selain razia, juga dibarengi dengan launching pembagian 50 ribu masker di 29 kecamatan dengan sasaran di pusat perbelanjaan yakni pasar tradisional, tempat wisata dan hiburan.

“Launching pembagian 50 ribu masker bukan hanya hari ini saja, tapi rutin dilakukan satgas kecamatan dibantu Satgas Kabupaten Serang untuk terus menggalakan kegiatan prokes, pada akhirnya masyarakat akan terbiasa dengan menerapkan 3 M, target kita itu,” terang Ade.

“Selain target penerapan 3 M, kita juga menargetkan Kabupaten Serang saat ini zona merah bisa kembali zona oranye, bahkan Kembali ke awal zona hijau, jangan sampai Kabupaten Serang zona merah terus,”harap Ade yang juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten ini.

Ade menyebutkan, berdasarkan hasil razia yang dilakukan masih ada ditemukan warga yang tidak mengenakan masker. Ade pun langsung mengingatkan tentang bahaya covid-19, serta meminta bantuan kepada masyarakat dan khususnya pedagang untuk saling mengingatkan dalam menerapkan 3 M. “Bantu kami pemerintah, kalau ada pedagang atau pembeli tolong di ingatkan agar memakai masker,” ucapnya.

Ade menegaskan, dengan masih adanya masyarakat yang tidak memakai masker kedepan akan lebih tegas dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar. Namun untuk saat ini, melihat kondisi secara konprehensif pihaknya hanya sebatas mengingatkan. “Tapi tidak menutup kemungkinan, jika pekan depan masih ada yang melanggar kami akan tegas

dengan sanksi sesuai Pergub dan Perbup,” tandasnya.

Ditempat yang sama Kepala BPBD Kabupaten Serang, Nana Sukmana menambahkan, kegiatan penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan (prokes) penyebaran covid-19 tidak terlepas sebagai upaya menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan 3 M. “Ini untuk mencegah berkembangnya dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Serang, dan menjadi baik,” ujarnya.

Nana mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat. Upaya penanganan sudah dilakukan sejak kasus pertama Covid-19 muncul di Kabupaten Serang.

Upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang. Di antaranya, melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan masyarakat hingga kantor pemerintahan, membagikan handsanitizer, masker, dan upaya-upaya lainnya. (Amrin)



Duta Bahasa Kabupaten Serang Bersaing di Nasional

Sukron dan Sulis, duta bahasa Provinsi Banten yang merupakan warga Kabupatæn Serang akan bersaing di tingkat nasional. Sebelumnya keduanya sudah meraih duta bahasa terbaik Provinsi Banten 2020.

Hal itu terungkap pada pertemuan Kantor Bahasa Provinsi Banten bersama jajaran pejabat Pemkab Serang di Pendopo Bupati Serang, Selasa (13/10). Hadir Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten Halimi Hadibrata, Asisten Daerah (Asda) II Pemkab Serang Adjat Gunawan, dan sejumlah pejabat Pemkab Serang.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten Halimi Hadibrata mengatakan, pertemuan itu salah satunya untuk membicarakan soal persiapan kompetisi duta bahasa tingkat Nasional yang akan digelar pada 21 Oktober hingga 24 Oktober 2020 di Jakarta. “Sebelumnya kegiatan duta bahasa Provinsi Banten sudah dilaksanakan di Pulau Tunda,” katanya.

Kemudian, pihaknya juga ingin mengkoordinasikan terkait program kebahasaan dan kesastraan di

Banten. Kemudian, juga ingin bekerjasama dengan Pemkab Serang untuk penggunaan dan pengawasan Bahasa Indonesia. “Termasuk juga untuk pengembangan bahasa daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Asda II Pemkab Serang Adjat Gunawan mengatakan, pihaknya merasa bersyukur dua warga Kabupaten Serang dapat mewakili Provinsi Banten di kompetisi duta bahasa tingkat nasional. “Alhamdulillah, duta bahasa Provinsi Banten yang terbaik putra dan putri keduanya dari Kabupaten Serang, Sukron dan Sulis,” katanya.

Pihaknya mendukung penuh keduanya untuk sukses di kompetisi duta bahasa tingkat nasional. “Tentu kami sangat bahagia, mudah-mudahan hal yang sama juga dapat diraih di tingkat nasional,” ujarnya.

Dikatakan Adjat, pada pertemuan itu juga membahas soal pengembangan literasi di Pulau Tunda. Namun, pengembangan literasi itu menemui kendala soal listrik yang terbatas. “Kami sudah berkiriman surat ke provinsi untuk memperbaiki dieselnnya, karena aset dieselnnya itu milik provinsi,” ucapnya. (Amrin)



**KOPI
HITAM**
Dengan
Gula Aren



کوفي هتام کوبلی آبین آباه فتر

Kopi Produksi Lokal Laris Hingga Luar Daerah

Produk lokal Kabupaten Serang selalu mengalami perkembangan. Salah satunya, produk Kopi Abah Petir yang diproduksi di Desa Mekarbaru, Kecamatan Petir.

Pemasaran Kopi Abah Petir saat ini sudah sampai luar daerah. Kopi ini mempunyai cipta rasa yang khas dengan kebiasaan meminum kopi orang Banten.

Pengelola Kopi Abah Petir Yadi Ahyadi mengatakan, awal mula ia mengelola kopi yang diproduksi di Desa Mekarbaru, Kecamatan Petir itu. Kata dia, kopi itu mulai diproduksi masal pada 11 Agustus 2020. Namun, rencana itu sudah dirancang sejak tiga tahun lalu.

Ia terinspirasi dari budaya masyarakat saat ini yang gemar meminum kopi. Kata dia, orang Banten memiliki cipta rasa sendiri dalam menyajikan kopi. "Orang Banten itu, ngopinya ngopi pahit, walaupun pakai gula, pakainya gula aren," ujarnya.

Kemudian, ia dan rekan-rekannya berinisiatif membuat kopi itu. Yakni, memadukan dua

kebiasaan cipta rasa orang Banten yang suka minum kopi pahit dan dengan gula aren. "Kopi yang kita racik, kalau panas rasanya pahit, kalau airnya mulai hangat manis gula arennya muncul," terangnya.

Kopi yang diproduksi Yadi akhirnya sukses menarik minat masyarakat. Ia kerap mendapatkan orderan dari wilayah Jakarta, Tangerang, Jawa Timur, Lampung, hingga wilayah Aceh.

Saat ini, pihaknya memproduksi kopi itu sampai 100 karton perhari. Setiap kartonnya, terdiri atas 120 saset. "Permintaan konsumen rata-rata untuk konsumsi pribadi, kalau untuk dijual di warung harganya tidak bisa bersaing dengan produk yang biasa dijual di warung," terangnya.

Ia memproduksi kopi itu buah kopinya diambil dari Lampung. Kemudian, gula arennya diambil dari Malingping, Kabupaten Lebak. "Kita mau mengambil dari lokal tapi tidak mencukupi, karena dalam satu tahun estimasi kita butuh 200 ton kopi," ucapnya. (Qomat)

175 Ton Beras dibagikan ke Nelayan



Sebanyak 175 ton beras akan dibagikan kepada para nelayan dan masyarakat yang berada di wilayah rentan rawan pangan di Kabupaten Serang. Beras itu berasal dari cadangan beras milik Pemprov Banten.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Serang Suhardjo mengatakan, bantuan beras itu masih dalam rangka untuk penanganan Covid-19. Akan ada 17.500 penerima yang tersebar di 11 kecamatan. "Penerimanya dari kalangan nelayan, dan wilayah-wilayah yang masuk rentan rawan pangan," katanya.

Suhardjo mengatakan, cadangan beras itu akan disalurkan dalam waktu dekat ini. Pihaknya saat ini sedang menginventarisasi penerima bantuan tersebut. "Insya Allah minggu depan sudah bisa disalurkan, per orang menerima 10 kilogram beras," ujarnya.

Kemudian, kata dia, saat ini juga sedang berlangsung penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk para nelayan. Bantuan itu berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). "Sekarang sudah tahap ketiga, ada 1.523 penerima," terangnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga sudah menyalurkan bantuan alat tangkap ikan kepada nelayan di Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka. Yakni, berupa perahu berkapasitas 4GT dan 2GT, jaring jilner, alat bantu penangkapan, hingga alat keselamatan. "Baru dua kecamatan, soalnya yang lainnya Firefocusing buat penanganan Covid-19," ucapnya.

Sementara itu, nelayan asal Kecamatan Cinangka Santani menyambut baik bantuan tersebut. Menurutnya, nelayan saat ini memang sedang menurun penghasilannya. "Kalau musim hujan gini emang jarang ngelaut, soalnya ombaknya besar, kalau ada bantuan ya itu yang kami harapkan," katanya. (Amrin)

Kejar Target Isbat Nikah 2.000 Pasangan, Perkuat Pendampingan Korban KDRT



Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang di bawah kepemimpinan Tarkul Wasyit terus mengoptimalkan kinerjanya. Keberadaan pandemi Covid-19 bagi DKBP3A bukan suatu rintangan untuk merealisasikan program-program kerja yang telah ditetapkan, namun menjadi tantangan tersendiri bagaimana target kerja bisa tercapai dengan baik.

Sejumlah program kerja yang menjadi prioritas terus dilaksanakan seperti pelayanan KB, baik yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non MKJP dengan tetap menerapkan protokol Covid-19. Kemudian program lain yang juga tidak kalah penting yakni kegiatan isbat nikah di kecamatan-kecamatan dengan target 2.000 pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat di kantor urusan agama (KUA).

"Hampir empat bulan kita mengalami pandemi Covid-19, secara kelembagaan kami mempunyai tugas pokok dan fungsi yang pertama, pengendalian penduduk melalui program KB. Kami akui bahwa dari aspek kualitas sedikit terkendala namun demikian kami membuat suatu terobosan yaitu kami melakukan pelayanan KB dengan mekanisme protokol kesehatan terkait Covid-19," ujar Tarkul, belum lama ini.

Sebagai upaya untuk mencegah putus alat kontrasepsi, DKBP3A menggenjot pelayanan KB non MKJP seperti KB melalui suntik, pil, dan kondom. Hal itu dilakukan karena pelayanan KB MKJP sangat terbatas dilakukan dengan adanya pandemi Covid-19 yakni setiap kegiatan pelayanan hanya 20 orang. Namun dari aspek kualitas tidak mengurangi pelayanan itu sendiri.

"Untuk yang suntik kita alokasikan ke masing masing Faskes (fasilitas kesehatan) termasuk bidan mandiri. Terkait pil dan kondom kita mengoptimalkan penggerak Pos KB desa dan Sub Pos KB desa. Ketika PUS (pasangan usia subur) yang akan putus kontrasepsi kita datangi sehingga ledakan kehamilan bisa dikendalikan," ujarnya.

Sedangkan terkait dengan program isbat nikah yang juga menjadi program prioritas, DKBP3A memastikan pada tahun ini program tersebut berjalan dengan baik. Setidaknya kegiatan isbat nikah pada tahun ini sudah digelar di empat kecamatan yaitu, Kecamatan Cikande, Jawilan, Cinangka, dan Kecamatan Ciomas dengan rata-rata peserta 60 orang per kecamatan.

Tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan program isbat nikah bagi pasangan yang belum tercatat di KUA. Dalam satu tahun Pemkab Serang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan isbat nikah bagi 2.000 pasangan suami istri, atau sampai dengan tahun 2020 ini diharapkan sebanyak 6.000 pasangan suami istri mendapat pelayanan isbat gratis.

"Memang untuk tahun ini pelaksanaannya ada yang berbeda. Saat sebelum ada kebijakan new normal kegiatan isbat nikah dilaksanakan di Pengadilan Agama secara bergantian, namun setelah ada kebijakan new normal ini kegiatan isbat nikah dilaksanakan di kecamatan-kecamatan. Kegiatan isbat nikah ini bagian dari program ketahanan keluarga," tuturnya.

Selain itu, DKBP3A juga memfokuskan perhatiannya terhadap perempuan yang menjadi binaannya yang pada saat ini terdampak Covid-19. DKBP3A melakukan pendataan para perempuan yang menjadi pelaku industri rumahan untuk meningkatkan tarif ekonomi keluarganya. Data tersebut selanjutnya akan disinergiskan dengan stakeholder yang lain untuk kemudian mendapatkan bantuan.

"Sudah kita lakukan monitoring, kita punya 1.500 perempuan yang mempunyai industri rumahan. Informasi terakhir dari data Kabid Pemberdayaan Perempuan itu sekitar 50 persennya yang terdampak Covid-19," ungkapnya.

Sedangkan terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Tarkul juga memastikan, DKBP3A terus melakukan pendampingan terhadap para korban sampai proses hukum selesai. "Dari aspek jumlah kita mengalami kenaikan sampai dengan bulan Mei sudah mencapai 40 kasus kekerasan," tuturnya. (Amrin)



Konsisten Wujudkan Target Perda, Semua Jalan Jadi Prioritas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang terus bekerja keras di tengah pandemi Covid-19 dalam mewujudkan kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang mantap agar bisa dilalui oleh masyarakat Kabupaten Serang dengan aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mereka.

Di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang ada, akibat difocusing untuk penanganan Covid-19, di bawah kepemimpinan Okeu Oktaviana dan Sekretarisnya Mohammad Hanafiah, DPUPR memastikan program pembangunan infrastruktur jalan tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan kualitas pembangunan dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan.

Upaya-upaya yang dilakukan itu, tidak lain sebagai bentuk konsistensi DPUPR di bawah arahan Bupati Serang Rt Tatu Chasanah dan wakilnya Pandji Tirtayasa dalam menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Serang yang telah menjadi kesepakatan bersama antara Pemkab Serang dengan DPRD Kabupaten Serang.

Walaupun saat sedang terjadi pandemi Covid-19 dan banyak anggaran yang difocusing untuk penanganan Covid-19, namun pada tahun ini, DPUPR untuk tahun tunggal membangun jalan kabupaten sebanyak 12 paket kegiatan dan untuk tahun jamak atau multiyears sebanyak tujuh paket kegiatan. "Untuk progresnya Alhamdulillah yang tahun tunggal sudah mencapai 99 persen," ujar Okeu.

Sedangkan untuk pembangunan jalan kabupaten yang multiyears diakui saat ini baru mencapai sekitar 5 persen karena sebagian anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun pada Februari 2021 ditargetkan untuk pembangunan jalan yang multiyears selesai 100 persen. "Kalau yang multiyears 2019-2020 progresnya sudah mencapai 95 persen," ungkapnya.

Walaupun realisasi pembangunan jalan yang menggunakan tahun jamak atau multiyears baru mencapai 5 persen namun hal tersebut masih on the track sesuai dengan jadwal pekerjaan. "Untuk keuangan progresnya sudah cukup bagus rata-rata sudah mencapai 66,9 persen. Untuk yang multiyears di antaranya Jalan Cinangka-Padarincang, Jalan Lebakwangi-Ciruas, dan Jalan Cimaung-Rangkaspanjang," tuturnya.

Selain fokus membangun jalan kabupaten, pada tahun ini DPUPR juga membangun jalan desa sebanyak 10 paket kegiatan dengan progres pekerjaan rata-rata mencapai 58 persen. "Memang ada yang progresnya baru 5 persen. Itu terjadi karena dana untuk pembangunan jalan desa yang seharusnya di murni dibayarkan 100 persen tapi karena Covid-19, hanya dibayarkan 30 persen, yang 70 persen dibayarkan di perubahan," katanya.

Kemudian, DPUPR juga akan membangun tiga paket kegiatan irigasi yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) yang semula anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19 namun kemudian dimunculkan lagi sebesar Rp2,2 miliar. "Udah kita lelangkan. Itu kan paling lambat 31 Agustus data kontraknya harus sudah terinput ke aplikasi OM SPAN. Sekarang lagi tahap evaluasi," ujarnya. (Amrin)

DPKD Optimalkan Kegiatan Silang Layan di Tengah Pandemi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang di bawah kepemimpinan Dr Tahyudin mengadaptasikan berbagai kegiatan yang ada di instansi tersebut dengan perkembangan virus korona atau Covid-19. DPKD sendiri memiliki tiga bidang yakni Bidang Bina Kearsipan yang dipimpin Dra Ema Rukmini Dewi M.Si, Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran yang dipimpin drg Effy Afidah, dan Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan yang dipimpin Heryadi Marfudi Senaaji.

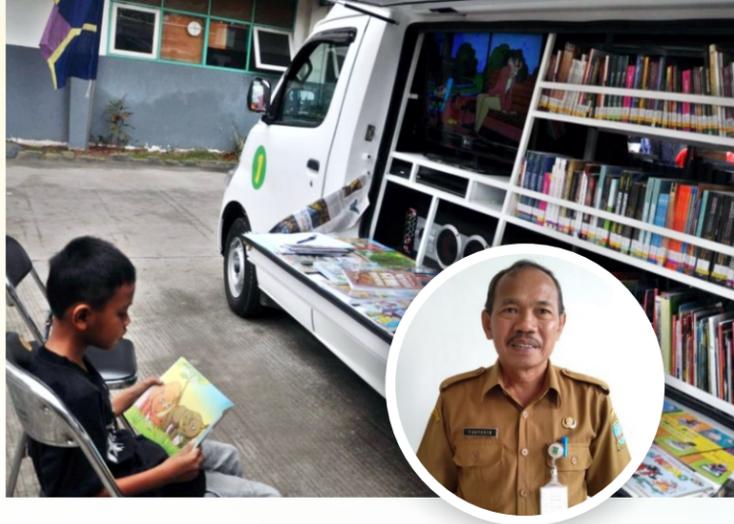
Tahyudin mengatakan bahwa pihaknya masih mengoperasikan mobil perpustakaan keliling ke masyarakat Kabupaten Serang. Hanya saja, rute dibatasi sekedar memenuhi permintaan dari mahasiswa yang melakukan kuliah kerja mahasiswa di desa.

"Jadi sekarang untuk perpustakaan keliling sesuai kebutuhan saja. Kalau dulu kan setiap hari jalan. Lima mobil jalan ke daerah-daerah. Kalau sekarang setelah dananya dialihkan untuk penanganan Covid, kita menerima permintaan saja. Kemudian kan juga sekolah dilakukan di rumah dan tidak boleh mengumpulkan orang. Jadinya kita sesuai permintaan saja," kata Tahyudin.

Ia menuturkan bahwa kegiatan perpustakaan keliling tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, dan tidak boleh berkerumun. "Sebagian tanggung jawabnya juga dilaksanakan oleh mahasiswa yang mengundang kita," kata Tahyudin.

Selain perpustakaan keliling, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang menggelar kegiatan silang layan perpustakaan. Silang layan perpustakaan adalah peminjaman buku antara perpustakaan, baik yang sistemnya sama maupun yang sistemnya berbeda, untuk dipakai khusus.

"Jadi kan ada taman bacaan masyarakat yang memerlukan buku. Karena kalau kita memberikan



buku secara cuma-cuma belum bisa, kita lakukan silang layan. Jadi buku apa yang dibutuhkan, kita kirim bukunya," kata Tahyudin.

Mantan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang itu mengatakan, sampai saat ini sudah ada 15 lokasi silang layan yang penuh kebutuhan bukunya oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang. "Ada yang di desa. Ada yang di polsek. Tapi banyaknya yang di desa," kata dia.

Ia tak khawatir jika kemudian buku-buku tersebut rusak karena banyak yang meminjam. "Karena kan buku untuk dipinjam dibaca. Kalo rusak ya namanya buku. Artinya bagus kalau terus digunakan untuk dibaca. Kecuali kalau sengaja dirusak. Tapi tetap kan kita juga punya tips untuk melakukan pemeliharaan," kata Tahyudin.

Tahyudin melanjutkan, perpustakaan Kabupaten Serang memiliki koleksi sekitar 34 ribu buku dengan 10 ribu judul. Sampai saat ini, pihaknya terus melakukan digitalisasi perpustakaan dan arsip yang masuk dalam aplikasi Sikasep atau Sistem Kearsipan dan Perpustakaan. "Perpustakaan tetap dibuka, tapi kita menghindari kerumunan. Dan yang datang juga memang enggak sebanyak sebelum Covid-19," kata Tahyudin.

Pria murah senyum itu mengungkapkan bahwa belum lama ini pihaknya bertemu dengan kepala perpustakaan nasional untuk membicarakan perihal pembangunan gedung perpustakaan di Kecamatan Pabuaran. Detail engineering design gedung yang berada di atas lahan 2 hektare itu sudah hampir rampung dikerjakan.

"Nanti di sana tidak hanya perpustakaan tok. Ada juga sarana permainan edukatif, sarana untuk penyandang disabilitas, ada pameran audiovisualnya, tempat diskusinya," kata Tahyudin seraya mengatakan bahwa lokasi pembangunan dekat dengan kampus baru Untirta.

Sementara itu, di bidang kearsipan, pihaknya juga melakukan kegiatan rutin seperti digitalisasi, serta fumigasi untuk menjaga arsip dari rayap dan hal lain yang bisa merusak arsip. (Amrin)

RPJMD
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD 2022-2026 Disiapkan

Pemkab Serang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang mempersiapkan pembentukan rancangan program jangka menengah daerah (RPJMD) 2022-2026. Untuk itu, Bappeda mengumpulkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra, terdiri atas perguruan tinggi dan pemerhati lingkungan.

Kepala Bappeda Kabupaten Serang, Rahmat Maulana mengatakan, saat ini Kabupaten Serang sudah mau menyelesaikan RPJMD 2016-2021. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Bappeda memiliki kewajiban untuk mempersiapkan banyak kegiatan yang akan berhubungan dengan penyusunan RPJMD 2022-2026.

"Sebenarnya tim sudah ditunjuk Januari, SK bupati sudah keluar cuma di awal-awal kami kan fokus ke Covid-19, jadi kami tetap kerja Bappeda, tapi kami berusaha untuk komunikasi secara internal," katanya kepada Kabar Banten saat ditemui se usai acara rapat penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan RPJMD 2022-2026 di Aula Tubagus Suwandi, Kamis, 5 November 2020.

Ia menuturkan, saat ini pihaknya memiliki kesempatan untuk mengumpulkan semua tim, yaitu seluruh kepala OPD dan mitra, terdiri atas perguruan tinggi dan pemerhati lingkungan.

Rahmat mengatakan, pembahsan RPJMD 2022-2026 disusun atas kondisi yang sedang terjadi di Kabupaten Serang. Kemudian, akan menentukan program prioritas yang akan langsung berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.

Pada 2020 ini, pihaknya ada kewajiban menyelesaikan dua tahapan awal, yaitu penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan penyusunan rancangan teknokratik untuk mendukung RPJMD nanti.

"Dua dokumen itu harus selesai 2020, maka kami coba pastikan tim punya persepsi yang sama, dalam penyusunan kami dibantu oleh tim ahli UGM. Mereka sudah sangat mumpuni dalam penyusunan," ujarnya. (Qomat)



Pemkab Serang Maksimalkan Keterbukaan Informasi

Pemkab Serang melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) terus melakukan upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten melakukan visitasi atau pembuktian atas ketersediaan keterbukaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen atau PPID Kabupaten Serang, Agus Yasa pada Rabu, 4 November 2020. Hasil dari visitasi tersebut akan dilakukan ekspos pada bulan Desember 2020 mendatang.

Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KI Banten, Nana Subana mengatakan, tahun ini pihaknya sedang melakukan pemeringkatan badan publik dalam keterbukaan informasi public, yang salah satu agendanya pertama adalah pemantauan Web dan sudah dilakukan pada Oktober.

Kemudian dilanjutkan presentasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan terakhir agendanya visitasi pembuktian atas ketersediaan keterbukaan informasi Publik di Kabupaten/Kota.

Adapun untuk hasilnya, kata dia semua hasil monitoring dan evaluasi akan dilakukan ekspos pada bulan Desember. "Itu diharapkan menjadi bagian evaluasi badan publik dalam melayani keterbukaan

informasi publik terhadap masyarakat," ujarnya kepada wartawan di Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Serang.

Terkait tindaklanjut bagi kabupaten/kota yang keterbukaan informasi publiknya tidak maksimal. Kata dia, meskipun pihaknya tidak diberi kewenangan untuk memberikan sanksi, tapi bagi KI menjalankan undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah kewajiban badan publik.

"Jadi yang menggunakan anggaran negara dia meski terbuka bagi masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan, kami tidak memberikan sanksi, tapi saya kira ekspos yang akan dilaksanakan KI akan menjadi bagian dari penilaian masyarakat terhadap badan publik," tuturnya.

Sementara itu Kepala Diskominfo Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya berharap pihaknya dapat memperoleh peringkat pertama dalam kegiatan pemeringkatan badan publik yang dilaksanakan oleh KI Banten ini. Karena, sebut dia, respon dari OPD juga cukup bagus.

"Kekurangan kekurangan yang ada sekarang ini kita lengkapi, karena ini menyangkut tindaklanjut daripada permintaan informasi dari bawah," ujarnya. (Amrin)

Pemkab Kirim Bantuan Bagi Warga Isolasi Mandiri



Dinas Sosial Kabupaten Serang menyalurkan bantuan kepada warga korban covid-19 yang melakukan isolasi mandiri. Bantuan berupa paket sembako bisa digunakan selama 14 hari pada masa isolasi mandiri.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Serang Sri Rahayu Basuki mengatakan, bantuan akan disalurkan sesuai permintaan pemerintah kecamatan. Terbaru, di Kecamatan Ciruas ada 37 orang dan Kecamatan Bojonegara 19 orang. "Kami kirimkan bantuan saat isolasi mandiri," katanya, Rabu (30/9/2020).

Dijelaskan Sri, pihaknya bergerak secara masif untuk menghimpun data yang terdampak covid-19 melalui pemerintah kecamatan guna mendapatkan informasi secara akurat. "Distribusi bantuan hasil dari koordinasi dengan camat sehingga bantuan dipastikan tepat sasaran," tegas Yuyu, sapaan akrabnya.

Sekadar diketahui, Dinsos Kabupaten Serang sudah menyalurkan bantuan terdampak covid-19 di 6 kecamatan diantaranya Kecamatan Bojonegara, Ciruas, Kibin, Lebakwangi, Bandung, Tirtayasa, Kragilan dan Petir yang terdampak karena melakukan isolasi mandiri. Bagi warga yang isolasi

dan belum mendapatkan bantuan, pihaknya meminta untuk dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan. Yuyu mengaku, pihaknya

bergerak mengirim bantuan sejak Agustus, ketika mendengar ada kasus positif dan melakukan isolasi maka tim

Dinsos langsung turun ke lapangan. Proses distribusi bantuan terdampak covid-19 memiliki administrasi yang ketat dengan adanya rekomendasi dari pihak Kecamatan untuk memastikan validitas data warga. "Prosesnya warga melapor ke RT diteruskan ke pihak Desa dan Kecamatan merekomendasikan kepada kita untuk menyalurkan bantuan," ucapnya.

Dinsos Kabupaten Serang berkomitmen untuk bekerja secara detail dan berkoordinasi aktif dengan pihak kecamatan guna penanganan korban terdampak covid-19. "Sehari pasca adanya laporan, kami bergerak menyediakan bantuan untuk terdampak pandemi covid-19," katanya.

Sementara itu, Camat Kibin Imron Ruhyadi menilai, bantuan yang disalurkan Pemkab Serang sangat bermanfaat bagi warga yang tengah isolasi mandiri. Soalnya, jika hanya mengandalkan dari pemerintah Desa

atau kecamatan, anggaran masih kurang untuk membeli makanan setiap hari selama 14 hari. "Kami sudah mendapat bantuan, ini program yang bagus dan bermanfaat, meringankan tugas kami di Kecamatan dan Desa," pungkasnya. (Qomat)



Ribuan Rutilahu Diperbaiki, Bangun Puluhan Sarana Pendidikan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti membangun rumah layak huni, membangun sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, dan pondok pesantren (ponpes).

Kemudian, membangun sarana dan prasarana air bersih seperti sanitasi, MCK, dan pamsimas serta program-program lainnya yang langsung dinikmati masyarakat. Selain itu, DPKPTB juga mempercepat proses serah terima fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) perumahan yang sering diabaikan oleh pihak pengembang.

Di bawah kepemimpinan Irawan Noor dan Sekretarisnya Suherlan, DPKPTB dapat menyelesaikan program-program kerjanya dengan cepat dan baik walaupun di tengah pandemi Covid-19, tentunya dengan mengutamakan keselamatan pekerja. Hasil dari kerja-kerja yang dilakukan DPKPTB itu jumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Serang jumlahnya terus berkurang.

Begitu juga dengan ruang kelas dan bangunan sekolah yang rusak dan kurang layak jumlahnya terus menurun. Tidak hanya itu, masyarakat yang memperoleh akses untuk mendapatkan air bersih atau air layak minum juga terus bertambah. DPKPTB juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Baznas dan forum CSR Kabupaten Serang dalam melaksanakan program-programnya.

Untuk tahun ini, DPKPTB Kabupaten Serang di bawah arahan buapti Serang non aktif Rt Tatu Chasanah dan wakilnya Pandji Tirtayasa telah memperbaiki rutilahu sebanyak 2.155 unit yang tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah rumah yang diperbaiki tersebut dari tahun ke tahun terus bertambah dan kualitas bangunan terus diperbaiki.

"Untuk yang sumber anggarannya dari APBD sebanyak 925 unit prosesnya sudah selesai 100 persen. Begitu juga

yang sumber anggarannya dari APBD provinsi sebanyak 100 unit dan dari APBN sebanyak 2.155 unit serta dari Baznas yang jumlahnya di atas 100 unit," ujar Irawan saat ditemui di ruang kerjanya.

Berkaitan dengan program perbaikan rutilahu ini, DPKPTB juga terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar mendapat tambahan, dan alhasil Kabupaten Serang mendapat tambahan sebanyak 250 unit dan saat ini dalam proses persiapan pelaksanaan pembangunan dan ditargetkan akhir Oktober semua selesai dilaksanakan.

"Dari sisi jumlah sampai dengan saat ini sisa rutilahu yang belum diperbaiki sekitar 4.801 unit yang pada posisi 2018 jumlahnya mencapai 8.884 unit. Tapi ibu bupati berkomitmen paling lambat 2022 semua rutilahu sudah bisa diselesaikan," katanya.

Selain itu, DPKPTB juga telah menyelesaikan pembangunan sejumlah gedung sekolah dan 16 pondok pesantren pada tahun ini. Jumlah ruang kelas yang diperbaiki tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya karena anggaran yang ada difocusing untuk penanganan Covid-19. Namun untuk pembangunan ponpes mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 13 ponpes.

Kemudian, DPKPTB juga saat ini sedang menyelesaikan tujuh paket kegiatan program pamsimas yang pengerjaannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. "Alhamdulillah kita juga sudah melakukan serah terima beberapa fasos fasum perumahan seperti Perumahan Cikande Indah, Bukit Pelamunan, dan Pondok Cilegon Indah," ungkapnya.

Selain itu, beberapa di antaranya juga dalam proses yaitu, Perumahan Bumi Ciruas Permai (BCP) 1 dan Cikande Puri Mas. "Kita melakukan jemput bola karena beberapa perumahan sudah ditinggalkan pengembangnya sebelum fasos fasumnya diserahkan. Kita ingin memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Serang bisa menikmati pembangunan yang dilakuka oleh pemerintah daerah," tuturnya. (Amrin)



LKBA Kabupaten Serang Dorong Warga Mandiri Ekonomi dan Kesehatan

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada semua bidang kehidupan, termasuk ekonomi dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Serang bersama Korem 064/Maulana Yusuf Serang, Polda Banten, dan Radar Banten mendorong warga untuk mandiri secara ekonomi dan mandiri dalam menjaga kesehatan.

LKBA merupakan program untuk mengedukasi masyarakat tentang kebersihan dan keamanan lingkungan. Program ini dikemas dengan bentuk perlombaan yang melibatkan seluruh desa di Kabupaten Serang hingga tingkat RW.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Serang Ade Aryanto mengatakan, warga harus terbiasa dengan pola AKB untuk mencegah penyebaran virus corona. Oleh karena itu dengan LKBA dan program Kampung Tangguh Nusantara yang digagas Polri mampu meminimalisasi penyebaran Covid-19.

Ia mengatakan, kriteria LKBA mirip dengan Kampung Tangguh Nusantara, hanya berbeda tentang kriteria terkait kesehatan dan ekonomi warga secara mandiri. Dengan hadiah yang disiapkan Pemkab Serang senilai Rp1 miliar, Ia berharap warga termotivasi untuk membenahi kampung. "LKBA tidak akan saya hentikan sampai warga benar-benar terbiasa untuk menerapkan pola hidup bersih, sehat dan aman," tegasnya.

Melalui program ini, kata dia, masyarakat diharapkan dapat terbiasa dalam menjaga lingkungannya. Terutama, dari sisi kebersihan dan keamanannya. Menurutnya, dengan terus dilakukan event tersebut, masyarakat akan termotivasi dan akan menjadi suatu kebiasaan.

Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Ricki Yanuarfi menambahkan, berdasarkan data Polda Banten, program ini dinamakan Kampung Tangguh Nusantara Kalimaya dan sudah terbentuk di 110 kampung. Sedangkan di Kabupaten Serang sendiri sudah terbentuk 24 kampung.

Dengan program Kampung Tangguh Nusantara, kata Ricki, bisa menopang dan melengkapi LKBA. "Kita utamakan warga bisa mandiri secara ekonomi dengan punya usaha bersama, bisa budidaya lele, pertanian dan lainnya," katanya.

Ia juga menegaskan agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas bisa menumbuhkan kembali gotong royong di tengah masyarakat. Kondisi kampung akan bagus dan indah jika pemuda dan orangtua saling bekerjasama. "Ada atau tidak ada lomba, kesadaran membangun kampung harus tetap dilaksanakan," ungkapnya. (Qomat)



MUI Kabupaten Serang Serukan Aksi Damai

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang menyerukan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi anarkis. Namun, penyampaian pendapat di muka publik harus dilakukan dengan santun dan damai.

Ketua MUI Kabupaten Serang, KH Rahmat Fathoni mengatakan aksi unjukrasa yang bersifat anarkis tidak dibenarkan dimanapun dan oleh agama apapun. Iapun mengimbau demonstran yang menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak anarkis dan haruslah bersifat santun.

"Silakan (demo aksi tolak UU Cipta Kerja) secara santun. Hak masyarakat, mahasiswa, atau buruh untuk berbicara, silakan karena setiap aksi unjuk rasa dilindungi undang-undang. Tapi MUI Kabupaten Serang menolak perilaku unjukrasa yang berujung kepada kekerasan dan anarkisme," kata KH Rahmat Fathoni saat menghadiri acara deklarasi Cinta Damai yang digelar di Mapolres Serang pada Senin, 19 Oktober 2020.

Acara pelaksanaan deklarasi cinta damai yang diinisiasi Polres Serang ini juga dihadiri Kapolres Serang AKBP Mariyono, PJU Polres Serang, Ketua Nadhatul Ulama (NU), Ketua Muhammadiyah, Ketua FKUB serta Ketua PC Ansor Kabupaten Serang, serta 10 Ketua Organisasi Kemasyarakatan se Kabupaten Serang.

Rahmat Fathoni menambahkan sebagai bangsa Indonesia, seharusnya kita semua patut bersyukur telah dianugerahi keanekaragaman suku bangsa dan agama dengan kerukunan antar sesama yang sudah diakui dunia. Oleh karena itu, sikap dan tanggungjawab kita yaitu berupaya untuk menjaga

persatuan, kesatuan serta keamanan NKRI dan jangan sampai terjadi perpecahan.

"Saya berharap dengan pertemuan ini mendapat hikmah, semakin erat jalinan silaturahmi dan tetap menjaga kondusifitas wilayah, khususnya di Kabupaten Serang," tandasnya.

Sementara AKBP Mariyono menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat mulai dari Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kondusifitas kamtibmas di wilayah Kabupaten Serang, dan berharap agar Deklarasi Cinta Damai ini terus digelorkan.

Terkait perkembangan adanya aksi penolakan RUU Cipta Kerja, kata Mariyono agar disikapi dengan bijak dan tidak mudah terprovokasi terhadap berita hoax. Kata Kapolres, penyampaian pendapat sudah diatur oleh UU namun juga harus menghargai hak orang lain, jangan sampai unjukrasa yang dilakukan berpengaruh terhadap situasi kamtibmas yang tidak kondusif.

"Acara Deklarasi Cinta Damai ini digelar bertujuan mencegah aksi anarkis di Kabupaten Serang, atau Provinsi Banten pada umumnya. Marilah kita bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Serang tetap kondusif, aman, nyaman dan sejuk," kata Kapolres.

Deklarasi Cinta Damai itu diakhiri dengan penandatanganan petisi dan pembacaan ikrar dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Serang dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Dalam ikrarnya, mereka menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme di wilayah hukum Polres Serang, Mendukung TNI Polri dalam memelihara kamtibmas tetap kondusif serta NKRI harga mati. (Qomat)



Satgas Covid-19 Sosialisasi 3M di Lembaga Pendidikan

Satuan tugas (Satgas) Penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan (prokes) terus melakukan upaya dalam memutus rantai penyebaran penyebaran wabah covid-19 di Kabupaten Serang. Dimulai dengan sosialisasi, penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan hand sanitizer.

Inspektur Pemerintah Kabupaten Serang, Rahmat Jaya mengatakan, pihaknya bersama satgas penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan pada Senin, 12 Oktober 2020 fokus di dua Kecamatan yakni, Petir dan Baros. Untuk satgas Difokuskan melakukan sosialisasi di pasar tradisional juga menasar lembaga pendidikan dan pondok pesantren (ponpes) dengan membagikan masker dan hand sanitizer.

"Saya bersama tim fokus di kantor pelayanan seperti kantor kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada pegawai dan masyarakat agar menerapkan 3 M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak," ujar Rahmat usai memimpin apel di halaman Kantor Kecamatan Petir.

Rahmat bersama satgas melanjutkan melakukan sosialisasi ke Kecamatan Baros. Ditemukan warga

tengah mengantri pembuatan KTP elektronik dan KK (kartu keluarga) tidak memakai masker, Rahmat pun langsung menegurnya. "Kami langsung tegur agar masyarakat membiasakan diri dalam menerapkan 3 M, mudah-mudahan masyarakat bisa memahami dan menerapkannya guna memutus rantai penyebaran covid-19," ungkap Rahmat Jaya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasada mengatakan, bahwa sosialisasi pencegahan penularan covid-19 di Kabupaten Serang dilakukan secara masif. "Kemarin hari sabtu juga kita lakukan penegakan protokol secara serentak di 29 kecamatan, untuk hari ini kita melanjutkan di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Petir dan Baros," ujarnya.

Untuk di Kecamatan Petir dan Baros, sebut Anas, Penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan tersebar di delapan area meliputi, pasar tradisional, lembaga pemerintahan, pendidikan dan pondok pesantren. "Jadi dari kegiatan ini memang ada catatan khusus buat kita agar lebih intensif lagi dalam mengampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat artinya mengingatkan lagi, agar masyarakat ini menerapkan 3 M," tutur Anas. (Amrin)

Pemkab Serang Sosialisasikan Pilkada



Ia mengatakan, pada sosialisasi itu pihaknya mengundang perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Ia berharap mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat lainnya. "Minimal kepada orang-orang terdekat, keluarga, tetangga," ujarnya.

Dikatakan Dikdik, ada beberapa masyarakat yang masih bertanya terkait pelaksanaan Pilkada. Karena itu, sosialisasi itu merupakan salah satu upaya untuk memberikan edukasi Pilkada kepada masyarakat. "Maka sosialisasi ini merupakan hal penting supaya masyarakat mengetahui," ucapnya.

Selain melakukan sosialisasi tatap muka, kata dia, pihaknya juga melakukan pemasangan baliho dan spanduk di setiap kecamatan. Ada sekitar lima hingga sepuluh baliho dan spanduk yang dipasang. "Itu berupa ajakan kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya di Pilkada," ujarnya. (Amrin)

Pemkab Serang meminta tokoh masyarakat untuk ikut mensosialisasikan waktu pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Karena, di masa pandemi Covid-19 upaya sosialisasi sulit menyentuh seluruh masyarakat.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Politik Dalam Negeri pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Setda Kabupaten Serang Dikdik Abdul Hamid mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi di tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Anyar, Tanara, dan Kecamatan Bandung.

Dikdik mengatakan, sosialisasi oleh Kesbangpol hanya dilakukan di tiga kecamatan karena keterbatasan anggaran. Selain itu, pihaknya juga tidak bisa mengumpulkan banyak masa karena pandemi Covid-19. "Di aturannya dibatasi hanya 50 orang," katanya, Selasa (10/11/2020).



Penyaluran BLT DD Berjalan Lancar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang yang mendapat tugas dalam menangani dampak penyebaran Covid-19. DPMD dituntut untuk memastikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) tepat sasaran dan berjalan dengan baik.

Di bawah kepemimpinan Rudi Suhartanto dan Sekretarisnya Haeratnah, DPMD Kabupaten Serang bersinergi dengan para pemerintahan desa untuk memastikan bahwa BLT DD yang disalurkan tepat sasaran. Proses penyaluran BLT DD di 326 desa pada tahap pertama bulan satu sudah mencapai 100 persen, kemudian bulan kedua sudah 98 persen, dan bulan ketiga sudah mencapai 95 persen.

"Penyaluran BLT DD untuk tiga bulan nilainya Rp600 ribu per orang dan selanjutnya Rp300 ribu per orang sampai dengan Desember. Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti," ujar Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Serang Nasir Al-Afghani, belum lama ini.

Adapun total anggaran DD yang digunakan untuk BLT di Kabupaten Serang pada tahap satu kurang lebih sebesar Rp70 miliar untuk 53.165 orang yang tersebar di 326 desa. "Untuk penerimanya dipastikan tepat sasaran dan tidak ada polemik di masyarakat karena data penerimanya sudah dikroscek dan data penerima sudah di musdeskan," katanya.

Selain menyukseskan penyaluran BLT DD, pada tahun ini DPMD juga fokus melakukan penguatan terhadap sumber daya manusia (SDM) pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Kita juga terus mengevaluasi kerja-kerja pengelola BUMDes karena kita memiliki target BUMDes ini bisa berkembang dan bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa," tuturnya.

Saat ini dari 326 desa di Kabupaten Serang, baru 91 desa yang telah memiliki BUMDes yang namun yang sudah

terregistrasi baru sekitar 75 desa dan yang berstatus aktif baru sekitar 50 BUMDes. "Agar BUMDes ini benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat desa dan perlu didukung SDM yang mumpuni, baik direktornya maupun staf-stafnya," paparnya.

Kemudian, untuk mendapatkan modal usaha, pengurus BUMDes juga perlu membuat proposal usaha yang selanjutnya diajukan ke kepala desa. "Kalau proposalnya dianggap bagus nanti desa mengeluarkan Perkades, ketika sudah ada Perkadesnya maka BUMDes bisa menerima penyertaan modal dari desa. Tanpa ada penyertaan modal BUMDes sulit berkembang," tuturnya.

DPMD juga fokus memberikan pembinaan kepada pengurus Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (UPK SPP) yang ada di kecamatan-kecamatan. Saat ini nasabah UPK SPP di Kabupaten Serang mencapai 100 ribu orang. Perkembangan UPK SPP di kecamatan-kecamatan terus berkembang.

"Untuk UPK SPP Kabupaten Serang pada saat saya ikut kunker di ke Pulau Dewata, Bali karena ingin membandingkan ternyata justru mereka yang banyak belajar ke kita karena UPK SPP kita sudah cukup bagus perkembangan usahanya," katanya.

Keberadaan UPK SPP sendiri banyak membantu perempuan atau nasabahnya dalam mengembangkan usaha yang mereka jalankan. "Keberadaan UPK SPP ini sangat membantu dalam permodalan. Bahkan, ada nasabah di Kecamatan Binuang dari mulai pinjaman Rp600 ribu saat ini pinjamannya sudah mencapai Rp70 juta," ungkapnya.

Adapun nasabah UPK SPP terbanyak ada di Kecamatan Cikeusal sehingga pandangan ketua UPK SPPnya sudah mencapai Rp13 juta per bulan. "Di Kecamatan Cikeusal itu luar biasa perkembangannya. Bahkan, Ibu Bupati (Rt Tatu Chasanah-red) mendorong, jika UPK memerlukan dana untuk mengembangkan UPKnya bisa mengajukan pinjaman ke Bank BPR Serang," ungkapnya. (Qomat)



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang H. Syamsuddin

DPMPTSP Lakukan Terobosan, Target Pendapatan Tercapai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang melakukan berbagai terobosan dalam keterbatasan situasi di tengah pandemi korona. Salah satu yang dilakukan adalah mengoptimalkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pendapatan seperti retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), serta retribusi lainnya.

Alhasil, instansi di kepemimpinan Kepala Dinas Syamsuddin SH, M.SI ini mencapai target bulan berjalan. Syamsuddin juga optimistis bahwa semua target di akhir tahun tetap tercapai. "Pendapatan dari sejumlah retribusi biasanya juga melampaui target. Kemudian kami juga melakukan koordinasi ke pihak penyedia jasa tenaga kerja asing, itu kami lakukan koordinasi jadi yang retribusinya jatuh tempo di November Desember itu kita minta

pembayarannya maju (Dipercepat). Sementara untuk IMB capaiannya sekarang sudah melampaui target," katanya.

Retribusi IMB dari target sekitar Rp 17,1 miliar sebelum perubahan capaiannya sudah mencapai sekitar Rp 18,603 miliar atau 108,79 persen. "Target retribusi IMB ini sudah beberapa kali ditambah, sebelumnya target awal sekitar Rp 14, 1 miliar kemudian di refocusing menjadi sekitar Rp 17,1 miliar, kemudian di perubahan target ditambah menjadi Rp 20 miliar. Saya yakin target baru itu juga tercapai. Untuk retribusi IMTA 100 dolar per bulan per orang," tutur Syamsuddin.

Sementara untuk retribusi IMTA, dari target sekitar Rp 10,650 miliar, sudah tercapai sekitar Rp 8,989 miliar atau 84,40 persen. "Tinggal sekitar Rp 1 miliar yakin itu tercapai. IMB banyaknya dari kawasan industri. Seperti Wilmar itu masuk sekitar Rp 6-7 miliar IMB nya. IMB itu potensi kita sekitar Rp 14 miliar, Sekitar Rp 6 sampai

7 miliar itu dari kawasan. Prediksi kami semua target di akhir tahun tercapai, jadi kita optimis target pendapatan tercapai," katanya.

Selama masa pandemi Covid-19 ini, kata Syamsuddin, DPMPTSP juga tetap melakukan pengawasan. Sebab laporan dari masyarakat juga banyak yang masuk. "Pengawasan sudah banyak dilakukan, soal perizinan laporan banyak, begitu surat (Laporan) masuk kita langsung turun pengawasan kelapangan. Rata-rata pengaduan soal bangunan diduga tak berizin, kemudian soal perizinan lingkungan," ujarnya.

Selain berupaya mengoptimalkan pendapatan, DPMPTSP juga berupaya agar investasi di Kabupaten Serang tetap optimal. Untuk investasi pada tahun 2020, DPMPTSP memiliki target investasi mencapai Rp 5.287.679.022.616. Dari jumlah tersebut hingga lewat pertengahan September telah tercapai Rp. 2.156.170.060.000 atau sekitar 41 persen dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan total 514 proyek. Dengan rincian, pada triwulan I capaian PMA Rp 154.526.450.000 dengan 97 proyek dan PMDN Rp. 2.525.600.000 dengan 58 proyek. Sedangkan pada Triwulan II untuk PMA mencapai Rp 406.591.410.000 dengan 227 dan PMDN Rp 1.592.526.600.000 dengan 132 proyek. Kemudian dari total capaian tersebut, tenaga kerja yang berhasil terserap 3.713 orang. Dengan rincian pada triwulan I PMA 448 tenaga kerja dan PMDN 101 tenaga kerja. Sedangkan Triwulan II PMA 636 tenaga kerja dan PMDN 2.528 tenaga kerja.

Meski adanya pandemi Covid-19 cukup berpengaruh terhadap investasi PMA dari luar negeri. Namun demikian, DPMPTSP tetap optimis masih bisa mengejar target yang sudah ditetapkan tersebut. Hal itu dikarenakan, saat ini capaian investasi yang masuk baru Triwulan I dan II, sedangkan untuk triwulan III belum rilis dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kemungkinan pada Oktober 2020. Begitu juga untuk triwulan IV, sehingga peluang untuk mengejar target capaian masih terbuka lebar.

Selama ini, setiap tahun DPMPTSP Kabupaten Serang selalu berhasil mencapai target yang ditetapkan bahkan lebih. Sementara, untuk tahun 2021, target capaian kemungkinan akan ditingkatkan sebesar 3 persen.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, penyumbang investasi terbesar ke Kabupaten Serang masih dari sektor industri. Bahkan seperti rencana BKPM bahwa dalam waktu dekat salah satu investor besar yakni PT Kenda Ruber akan relokasi ke Indonesia yakni di Kabupaten Serang. Nilai investasi dari perusahaan asing ini diyakini diatas Rp 1 triliun. Selain perusahaan tersebut, ada juga beberapa investor kecil yang masuk seperti di kawasan modern industri.

Adanya PT Kenda Ruber yang akan melakukan perluasan tersebut diyakini akan dapat mendorong investasi di Kabupaten Serang. Terlebih investasi ini dikawal langsung oleh BKPM. Alasan perusahaan tersebut masuk ke Indonesia khususnya Kabupaten Serang karena tingkat keamanan dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Serang dianggap baik.

Sejauh ini walau dalam masa pandemi belum ada informasi perusahaan yang hengkang dari Kabupaten Serang ke luar daerah. Hal itu terlihat dari belum adanya laporan yang masuk ke Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Selain itu, Kebijakan pemerintah Kabupaten Serang saat ini pun sudah berpihak pada investor, diantaranya saat ini sejumlah infrastruktur jalan sudah dalam kondisi baik, sehingga hal ini diyakini akan dapat menarik investor untuk menginvestasikan modalnya di Kabupaten Serang.

Kepala DPMPTSP mengakui adanya penurunan investasi akibat pandemi Covid-19. Namun demikian ada hikmah dari pandemi tersebut, yakni yang biasanya PMA selalu mencapai target diatas 100 persen dan diatas PMDA, namun kini kondisinya berbalik. "Sekarang kebalik PMA dibawah PMDN ada berapa persen lah. Ini salah satu bukti bahwa dengan kondisi Covid sekarang peluang orang asing masuk Indonesia minim sehingga yang lebih berdaya pengusaha lokal," tuturnya.

Sampai saat ini diakuinya untuk PMA dan PMDN belum ada yang mencapai target. Biasanya dalam kondisi normal pada Agustus dan September sudah tercapai 100 persen, sehingga empat bulan tersisa hanya mengejar kelebihan dari target. Secara umum penyumbang terbesar investasi masih dari industri. "Kita harus kerja keras maksimalkan potensi agar bisa dicapai (target). Tapi kalau melihat capaian hari ini dengan angka yang ada sesuatu yang sangat berat tapi masih ada beberapa bulan kedepan untuk benahi. Kita berusaha maksimal, karena data di kita baru ada triwulan I, II kalau III belum kita dapat kan dari provinsi," ucapnya. (Qomat)

Pembinaan Atlet dan Pemuda Terus Dilakukan



KPU Diminta Datangi Pemilih Lansia

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Serang Ade Aryanto meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan warga menyalurkan hak pilihnya. Termasuk para pemilih lanjut usia (Lansia) dan yang sedang sakit.

Hal itu disampaikan Ade saat menghadiri rapat koordinasi tim desk Pilkada di Aula Brigjen KH Syamun, Pemkab Serang, Rabu (4/11). Hadir Sekda Pemkab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, para kepala OPD, serta pimpinan instansi TNI-Polri di wilayah hukum Kabupaten Serang.

Ade mengatakan, pihaknya mengusulkan KPU langsung menjemput bola kepada pemilih yang lansia dan yang sedang sakit. Supaya, mereka menyalurkan hak pilihnya. "Setelah selesai pemilihan di TPS, petugas TPS bisa mendatangi lansia dan yang sedang sakit ke rumahnya, tapi didampingi masing-masing saksi Paslon," katanya.

Menurut Ade, hal seperti itu lebih efektif untuk memastikan warga menyalurkan hak pilihnya tak terkecuali yang lansia dan yang sedang sakit. Karena,

jika mereka harus datang ke TPS, akan membebani. "Tapi ini hanya usulan saya yah, saya juga tidak bisa intervensi," ujarnya.

Sementara, Sekda Pemkab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, pihaknya meminta seluruh OPD untuk ikut menyukseskan Pilkada 2020. Salah satunya, soal fasilitas administrasi kependudukan. "Manfaatkan waktu yang ada, coba di inventarisasi berapa data yang sudah aman dan berapa yang belum punya KTP sampai hari pencoblosan," katanya.

Pihaknya tidak menginginkan saat hari pencoblosan ada warga yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena persoalan administrasi kependudukan. "Ini mohon untuk diantisipasi, supaya semua warga bisa menyalurkan hak pilihnya," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Serang Mulyadi mengatakan, pihaknya akan membicarakan usulan tersebut di internal KPU. Sementara, untuk kebijakannya pihaknya masih menunggu PKPU terbaru. (Qomat)



Dokumentasi foto diambil sebelum pandemi covid-19

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang terus melakukan pembinaan kepada para pemuda dan atlet. Pembinaan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya.

Pada program kepemudaan, Disporapar sudah melakukan pembinaan bagi pemuda yang mengikuti seleksi program Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Yakni, program kapal pemuda nusantara (KPN), perekrutan pemuda antar negara (PPAN), hingga jambore pemuda Indonesia (JPI).

Untuk program KPN, Disporapar sudah memfasilitasi program seleksi pemuda dari mulai tingkat kabupaten, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional. Program ini, para peserta diikutsertakan pada program kementerian seperti program sosial hingga kebencanaan. "Kita sudah kirim perwakilan Kabupaten Serang untuk mengikuti seleksi," ujar Kepala Disporapar Kabupaten Serang Hamdani.

Kemudian, hal yang sama juga dilakukan untuk para pemuda yang mengikuti seleksi PPAN. Program ini, merupakan program pertukaran pemuda antar negara. "Seperti yang sudah dilakukan dikirim ke Negara Korea," ujarnya.

Lalu, pihaknya juga melakukan seleksi untuk para pemuda untuk mengikuti program JPI. Program ini, merupakan kegiatan di skala nasional untuk memperkenalkan pariwisata dan kebudayaan daerah. "Semuanya bertujuan untuk mengembangkan potensi pemuda dan memperkenalkan potensi daerah," terangnya.

Program lainnya, Disporapar juga melakukan pembinaan kepada pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka). Pembinaan dilakukan melalui Purna Paskibraka Indonesia (PPI). "Kita yang memfasilitasi pembinaannya," ujarnya.

Selain itu, Disporapar juga melakukan pembinaan kepada para atlet yang mengikuti pekan olahraga pelajar daerah (Popda) Provinsi Banten. Ada sebanyak 250 atlet dengan 19 cabang olahraga (cabor) yang dilakukan pembinaan.

Ia mengatakan, pembinaan itu untuk persiapan Popda Provinsi Banten yang akan diselenggarakan pada 2021. Awalnya, Popda akan diselenggarakan pada tahun ini, akan tetapi karena pandemi Covid-19, Popda terpaksa harus digeser ke 2021. "Kita terus melakukan pembinaan secara maksimal, supaya para atlet juga dapat tampil maksimal di Popda," ujarnya. (Amrin)



BKPSDM Gunakan Aplikasi SIMPEG

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepegawaian. Salah satunya dengan menerapkan pelayanan berbasis digital melalui aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).

Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, Mohamad Ishak Abdul Raup mengatakan, dengan adanya aplikasi SIMPEG ini ASN yang akan mengurus pensiun atau mengurus kenaikan pangkat tidak perlu lagi membawa berkas banyak ke BKPSDM Kab. Serang.

"Nama aplikasinya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, kalau ringkasnya disebut SIMPEG, jadi yang mau pensiun atau naik pangkat tinggal upload saja," kata Mohamad Ishak kemarin.

Diakui Ishak, sebelum adanya aplikasi SIMPEG ASN sangat dikeawalahan saat akan mengurus kaitan dengan pensiun, karena memakan waktu. Contoh, seperti dari Dinas Pendidikan saat mau pensiun mereka harus membawa berkas kesini (BKPSDM),

kemudian berkas dibawa ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Kalau sekarang mah kalau ada kekurangan baru (berkas dibawa)," ujarnya.

Ishak menjelaskan untuk mengakses aplikasi SIMPEG tersebut cukup mudah. Menurutnya dari dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat langsung membuka aplikasi SIMPEG dan langsung mengisi data, kemudian setelah itu diperiksa oleh BKPSDM apakah ada kekurangan atau tidak.

"Selanjutnya langsung online ke BKN Kanreg III, tapi memang karena keterbatasan SDM untuk sementara Kasubag kepegawaiannya menginput disini (BKPSDM Kab. Serang)," tuturnya.

Namun ia mengimbau kaitan dengan pelayanan soal pensiun atau kenaikan pangkat ini satu tahun atau enam bulan sebelumnya ASN tersebut harus sudah mengajukan. Sehingga begitu masuk pensiun sudah dapat menerima SK.

"Jadi ada satu dua orang ada yang baru ngajuin dua bulan, tiga bulan, otomatis lambat, jadi ketika dikerjakan mereka belum tentu pas pensiun mendapat SK, tapi sekarang sudah bagus yah," imbuhnya. (Amrin)



SEKDA SERUKAN GERAKAN BERBAGI

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengimbau kepada seluruh ASN untuk tidak menonjolkan hidup berlebihan. Namun, harus saling berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Entus mengatakan, di masa pandemi Covid-19, bukan hanya terjadi persoalan kesehatan saja. Akan tetapi, juga terjadi kesulitan ekonomi di masyarakat. "Saya mengimbau kepada para ASN untuk tidak menonjolkan hidup yang berlebihan. Tapi, saat ini kita harus melakukan gerakan berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujarnya Jumat (9/10).

Entus mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), persoalan ekonomi di masyarakat berimbas pada tingginya tingkat kriminalitas. "Bu Kajari Cilegon menyampaikan tingkat kriminalitas saat ini tinggi," ujarnya.

Karena itu, ia juga mengimbau kepada seluruh camat untuk menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di wilayahnya masing-masing. Supaya, kemanan masyarakat dapat terwujud. "Segera berkoordinasi dengan Muspika dan desa," tegasnya.

Sementara itu, Camat Cikande, Mohammad Agus mengatakan, kegiatan siskamling di daerahnya sudah berjalan. Terlebih lagi, seiring dengan dilakukannya program Lomba Kampung Bersih dan Aman (LKBA) dan Kampung Tangguh. "Alhamdulillah siskamling sudah aktif di Cikande," katanya.

Ia tidak memungkir di wilayahnya tingkat kriminalitas cukup tinggi. Menurut Agus, itu lantaran wilayah Kecamatan Cikande merupakan jalur lintas dua jalan nasional yakni jalan Serang-Jakarta dan Jalan Cikande-Rangkasbitung. "Beberapa waktu memang banyak pencurian motor di pertokoan, kantor swasta sampai di kantor kecamatan, makanya kami himbau juga masyarakat untuk tetap waspada," ucapnya. (Qomat)



BPKAD Terus Berinovasi Optimalkan Kinerja

Program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang selama pandemi Covid-19 tetap dioptimalkan.

Salah satu program kerja yang sedang dijalankan BPKAD yakni mengembangkan inovasi-inovasi program dengan membangun berbagai aplikasi untuk menata sistem pendataan, terutama untuk aset atau barang milik daerah agar semakin lebih baik lagi.

Salah satu upaya yang dilakukan BPKAD yaitu dengan membangun aplikasi kode label barang dengan tujuan mempermudah dalam sensus barang milik daerah. Dalam hal ini BPKAD bertekad supaya semua sistem, khususnya yang berada di BPKAD Kabupaten Serang mulai menuju percepatan menggunakan aplikasi.

Sehingga tidak ada lagi sistem yang masih menggunakan cara-cara manual. Adanya aplikasi kode label barang atau pencantuman barcode pada aset atau barang milik daerah ini akan dapat mempermudah dalam pemantauan dan penataan barang tersebut.

Aplikasi kode label barang ini baru diterapkan di area kerja BPKAD Kabupaten Serang, namun kedepan aplikasi tersebut juga direncanakan diterapkan di semua OPD Kabupaten Serang.

Aplikasi kode label barang BPKAD dikembangkan atau terkoneksi dengan Executive Dashboard ATISISBADA. Halaman depan pada aplikasi pengolah data Barang Milik Daerah (BMD) ATISISBADA yang memvisualisasikan data BMD yang dikelola oleh Pemkab Serang dalam bentuk informasi bergambar, diagram, tabel, grafik, peta sebaran aset daerah berdasarkan data yang diolah secara otomatis dari database.

Dari aplikasi ATISISBADA ini kemudian tiap barang-barang milik daerah dibuat kode masing-masing yang berbentuk barcode. Semua data yang ada di

ATISISBADA ini akan masuk secara otomatis ke dalam aplikasi kode label barang, selanjutnya barcode akan tercetak dengan kode yang berbeda-beda sesuai dengan jenis barangnya. Setelah masuk pencetakan, Barcode tersebut kemudian akan ditempelkan pada barang milik daerah yang ada.

Jenis-jenis barangnya mulai dari barang bergerak dan tidak bergerak. Pengguna telepon pintar atau smartphone akan mudah melihat atau mendeteksi barang-barang yang sudah disematkan barcode oleh operator di BPKAD Kabupaten Serang. Setelah pengguna Smartphone melakukan scan, maka akan muncul nama jenis barang, pemilik barang, harga barang, tahun pembelian dan sub unit kode barang.

Aplikasi kode label barang ini dapat lebih memudahkan mengontrol barang milik daerah menggunakan smartphone. Berbeda dengan ATISISBADA yang harus melihat datanya melalui aplikasi di dalam komputer. Dengan aplikasi kode label barang diharapkan barang-barang milik daerah dapat mudah tertata dengan baik dan tidak ada yang mengklaim.

Untuk aplikasi kode label barang saat ini hanya diterapkan pada jenis-jenis barang yang ada dalam ruangan kerja BPKAD Kabupaten Serang. Sementara untuk kendaraan dinas baik mobil hingga motor belum dicantumkan barcodenya. Targetnya di akhir tahun 2020 semua barang di BPKAD Kabupaten Serang akan diberikan barcode untuk memudahkan dalam pengawasan barang tersebut.

Penerapan kodel label barang di BPKAD Kabupaten Serang sudah berjalan. Selain itu, di 2021 BPKAD juga berencana akan menerapkan kode label barang ini kepada barang-barang milik daerah yang ada di semua OPD Kabupaten Serang. Hal tersebut bertujuan untuk membantu OPD lain dalam mengontrol barang milik daerah yang ada di area kerjanya. (Amrin)



Sepuluh

Calon Barista Dilatih

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang melepas sepuluh calon barista untuk mengikuti pelatihan di Balai Larihan Kerja Lembang, Bandung.

Disnakertrans Kabupaten Serang memiliki program pelatihan kerja di berbagai bidang. Mulai dari pelatihan menjahit, otomotif, pelatihan barista, dan pelatihan di bidang keahlian lainnya. Program itu semata-mata untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi angka pengangguran.

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Serang Sutarya mengatakan, sepuluh calon barista itu akan mengikuti pelatihan meracik kopi empat hari. "Tadi (kemarin-red) kita baru pelepasan," katanya, Senin (19/10/2020).

Ia mengatakan, awalnya pihaknya mengajukan 20 peserta untuk mengikuti pelatihan barista. Namun, sementara ini baru disetujui 10 peserta. "Ke depan mudah-mudahan kita bisa kirim lagi untuk pelatihan," ujarnya.

Dikatakan Sutarya, pelatihan barista itu awalnya atas usulan dari Pemerintah Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka. Karena, di desa itu potensi kopi cukup besar. "Akhirnya kita carikan wadah untuk pelatihan, Alhamdulillah kita dapat di Lembang," terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cikolelet Ojat Darajat mengatakan, perkebunan kopi di desanya mencapai 40 hektare. Karena itu, potensi kopi di desanya cukup menjanjikan. "Kita juga punya brand sendiri namanya Cikopi, Cikolelet Kopi," katanya.

Ia mengatakan, selama ini para petani kopi masih menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak. Ke depan, pihaknya ingin produksi kopi dilakukan di desanya. "Kita inginkan yang di jual itu bukan berupa mentahnya, tapi hasil produksi," ujarnya.

Dikatakan Ojat, setelah pelatihan, pihaknya akan melibatkan warganya itu dalam pengembangan kopi di desanya. Sehingga, kopi Cikopi dapat menjadi produk unggulan Kabupaten Serang. "Ini juga siap disinergikan dengan BUMDes," ucapnya. (Qomat)

PEMKAB SERANG

Terima Hibah Rehab LIMA SD



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menerima hibah lima Sekolah Dasar Negeri (SDN) hasil rehabilitasi tahun 2019. Hibah itu diterima dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten.

Kelima SDN meliputi, SDN Renged 1, SDN Sumur Hejo, SDN Telaga, SDN Lempuyang, dan SDN Gabus 1. Selama ini, rehabilitasi fasilitas pendidikan memang menjadi salah satu program prioritas Pemkab Serang. Dengan adanya bantuan dari Kementerian PUPR, Pemkab Serang terbantu karena

dapat mengurangi jumlah ruang kelas rusak di Kabupaten Serang.

Penyerahan ditandai dengan Penandatanganan berita acara dan naskah hibah barang milik negara antara Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq BPPW Banten kepada Pemerintah Kabupaten Serang. Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Serang, Ade Ariyanto di pendopo bupati pada Selasa, 20 Oktober 2020.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha BPPW Banten, Suksesno mengatakan, rampungnya reha-

bilitasi lima SDN sebelumnya dilakukan melalui proses pembahasan, koordinasi dan meninjau lokasi bersama. Sehingga, pihaknya saat ini bisa melaksanakan pemindahtanganan barang milik negara dengan cara hibah.

“Ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor:111/PMK.06/20-16 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara, dan peraturan menteri PUPR Nomor 5 tahun 2020 tentang pemindahtanganan barang milik negara,”ujarnya kepada wartawan usai penandatanganan.

Dijelaskan Suksesno, 5 SDN yang dilakukan rehabilitasi meliputi ruang kelas, ruang guru, sarana ibadah, sarana olah raga, mandi cuci kakus (MCK) dan lainnya yang dilakukan pada tahun 2019 lalu dan diserahkan pada tahun 2020. “Rehabilitasi 5 SDN BPPW Banten menghabiskan dana APBN sebesar Rp3,7 miliar,”terangnya.

Suksesno memaparkan, bahwa Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq BPPW Banten menyerahkan aset Pemkab Serang hasil renovasi dilakukan tiga tahap. Sebelumnya, BPPW Banten menyerahkan kepada Pemkab Serang berupa 3 unit instalasi pengelolaan air. “Kemudian 1 kegiatan pengembangan jaringan perpipaan dengan menelan dana APBN senilai Rp33,56 miliar,”bebernya.

Kedepan yakni tahap ketiga, berdasarkan surat kesediaan menerima hibah barang milik negara yang telah ditandatangani oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah. BPPW Banten akan menyerahkan barang milik negara berupa Penataan Kawasan Masjid Syekh Nawawi Tanara, peningkatan jalan desa, Instalasi pengelolaan air dan pengembangan jaringan perpipaan. “Untu tahap ketiga itu menelan dana sebesar Rp33,48 miliar,”ungkapnya.

Dengan begitu, BPPW Banten mengapresiasi kepada Pemkab Serang yang telah menerima aset. Dengan mengharapkan dan menjadi role model yang baik untuk merangsang pemerintah daerah lain untuk melakukan hal yang sama. “Semoga aset yang diserahkan kepada Pemkab Serang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten Serang,”tutur Suksesno.



Hadir turut mendampingi Pjs Bupati Serang, Ade Ariyanto dalam penyerahan aset tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda), Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Asda I, Nanang Supriatna, Asda III, Ida Nuraida, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Fairu Zabadi, Kepala Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan, Irawan Noor, dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosatik), Anas Dwi Satya Prasadya dan lainnya.

Pjs Bupati Serang Ade Ariyanto mengaku gembira dalam kondisi Pandemi Covid-19 adanya dukungan dalam program-program yang ada di Kabupaten Serang. Ade mengingatkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar benar-benar memanfaatkan dan merawatnya dengan baik serta memeliharanya. “Membangun mudah, merehab mudah namun memelihara yang sulit. Harus benar-benar merawat agar umur gedung panjang,”ujarnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten ini berharap, kepada Kementerian PUPR melalui BPPW Banten agar program hibah ini tidak berhenti sampai disini. Sebab, secara kewilayahan di Banten masih banyak membutuhkan sentuhan bantuan dari Pemerintah Pusat.

“Karena kalau mengandalkan APBD yang terbatas kapan bisa terealisasi semua program. Jadi kepada dinas teknis harus mampu untuk lobi-lobi, kalau tidak disampaikan BPPW Banten tidak akan tahu kebutuhan Kabupaten Serang,”jelas Ade. (Amrin)



BPBD Jadi Rujukan BNPB Pusat



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang yang memiliki kesibukan tersendiri sendiri selama masa pandemi Covid-19 ini. Sebagai bencana nonalam, pencegahan dan penanganan Covid-19 terus diupayakan oleh BPBD Kabupaten Serang agar pemutusan mata rantai penularan Covid-19 terkendali dengan baik.

Di bawah kepemimpinan Nana Sukmana Kusuma dan Sekretarisnya Tb Maftuhi, sejak pertama kali pandemi Covid-19 muncul di Indonesia, atas arahan Bupati Serang, BPBD bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Serang langsung bergerak melakukan sosialisasi dan melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh wilayah di Kabupaten Serang terutama di tempat-tempat umum.

"Pemda Serang sejak terjadinya Covid-19 tidak henti-hentinya melakukan pemutusan mata rantai dan melakukan penguatan kepada masyarakat apa itu Covid-19, bagaimana pencegahannya. Bahkan, BPBD siaga 24 jam melakukan pemantauan, melakukan sosialisasi, edukasi, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen disaster," ujar Nana saat ditemui di ruang kerjanya.

Saat Kabupaten Serang ditetapkan zona merah Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi Banten pada awal September lalu, BPBD juga mengambil langkah-langkah strategis dan massif dalam melakukan pencegahan penularan Covid-19 melalui kegiatan peningkatan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan (prokes) dengan melakukan gerakan

pembagian 50 ribu masker serentak di 29 kecamatan.

"Kita di BPBD bersama Dinas Satpol PP dan OPD lainnya juga melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan malam. Ada delapan daerah yang rawan terjadi penyebaran Covid-19 yang terus kita pantau seperti daerah industri, perhotelan, pasar, tempat pariwisata dan yang lainnya," katanya. BPBD sebagai pusat crisis center percepatan penanganan Covid-19 terus memonitor seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan. Dalam sehari, BPBD mencatat rata-rata kegiatan pencegahan Covid-19 lima sampai enam kegiatan di tempat yang berbeda. "Kita berharap dengan adanya kegiatan pendisiplinan masyarakat benar-benar bisa memahami bahwa Covid-19 ini sangat berbahaya," tuturnya.

Selain gencar melakukan gerakan pendisiplinan penerapan prokes Covid-19, BPBD juga terus melakukan sosialisasi penerapan prokes Covid-19 melalui media sosial (medsos), kemudian melalui poster-poster yang berisi ajakan agar masyarakat menerapkan prokes Covid-19. "BPBD sadar betul bahwa bencana nonalam ini adalah salah satu tupoksi BPBD, maka saya memerintahkan seluruh jajaran BPBD untuk melakukan manajemen disaster," paparnya.

Para pejabat di BPBD mulai dari kepala bidang (Kabid) dan Kepala Sub Bidang (Kasubid) serta seluruh jajaran staf bekerja secara maksimal dan para pejabat yang ada dibagi menjadi tiga shift dan bekerja selama 24 jam. "Kita tidak ada libur setiap hari tim standby. Alhamdulillah Kabupaten Serang dari awal kasusnya sudah landai karena begitu ada kasus kita langsung melakukan langkah-langkah pencegahan," ungkapnya.

BPBD juga mendorong Satgas di tingkat desa untuk menyiapkan rumah singgah bagi warganya yang akan melakukan isolasi mandiri. "Target kita hijau tapi kan itu cukup sulit karena kita terdiri dari banyak orang dan penularan virus ini melalui orang bukan melalui benda mati tapi kita terus bekerja dan tentu harus ada dukungan dari masyarakat secara luas," katanya.

Selain fokus melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19, BPBD juga fokus melakukan penanganan terhadap kebencanaan lainnya yang terjadi di Kabupaten Serang. "Melalui manajemen disaster yang baik ini kita terus mengupayakan kinerja anggota juga semakin maksimal. Ada

bencana atau tidak, anggota kami terus melakukan pemantauan. Tentunya berkoordinasi dengan ODP terkait," ujarnya.

Kerja-kerja BPBD yang tiada hentinya itu, mendapat apresiasi dari lembaga-lembaga nasional dan memberikan penghargaan terhadap kinerja BPBD Kabupaten Serang. Selama periode Agustus-September, BPBD menerima empat penghargaan di antaranya penghargaan dari "Indonesia International Service Excellence Award 2020".

Kemudian, sebagai Kepala BPBD Nana mendapat penghargaan "Indonesis Outstanding Award 2020", dan mendapatkan penghargaan "Indonesia Best Choice Award 2020. "Alhamdulillah kerja-kerja BPBD ini mendapat reward dari lembaga-lembaga tingkat nasional yang kita tidak tahun penilaiannya seperti apa," paparnya.

Selain itu, BPBD Kabupaten Serang menjadi BPBD yang banyak dikunjungi beberapa kabupaten/kota di Indonesia, kementerian dan lembaga-lembaga nonpemerintahan untuk melakukan studi banding terkait manajemen disaster yang ada di BPBD Kabupaten Serang. "Mereka yang datang ke sini untuk studi atas rekomendasi BNPB Pusat karena BPBD kita menjadi rujukan dan pilot project," ungkapnya.

Ke depan Nana berharap, sarana dan prasarana (sarpras) yang ada di BPBD Kabupaten Serang bisa dilengkapi agar kinerja BPBD bisa lebih baik lagi, walaupun dengan sarpras yang ada BPBD sudah bisa memaksimalkan. "Tahun ini kami melakukan pendekatan terhadap penentu kebijakan agar sarpras kami bisa dilengkapi dan kesejahteraan anggota kita bisa ditingkatkan," katanya.

Nana juga menargetkan, ke depan setiap desa memiliki pusat pengendali operasi (Pusdalop) untuk memudahkan komunikasi dan informasi. "Respons time kita sekarang 6,8 menit. Terus juga kita pengen anggota kita yang jumlahnya 300 lebih punya asuransi jiwa dan perlindungan hukum karena mereka bekerja risikonya sangat tinggi," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Serang Ade Ariyanto mengapresiasi kinerja Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 di bawah koordinasi BPBD Kabupaten Serang. "Satgas kita sudah luar biasa, tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan, sehingga status zona merah tidak lama untuk Kabupaten Serang," kata Ade. (Amrin)



Ratusan Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Pemkab Serang terus melakukan upaya untuk melakukan penanganan Covid-19 di masyarakat. Penanganan dilakukan secara maksimal hingga proses penyembuhan.

Data hingga akhir Oktober 2020, sudah ada 538 warga Kabupaten Serang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dari jumlah tersebut, menurut pihak Dinkes, banyak juga pasien yang kini sudah dinyatakan sembuh.

Kepala Dinkes Kabupaten Serang, drg Agus Sukmayadi mengatakan, berdasarkan data, total kasus positif mencapai 538 orang. Yakni, 20 orang meninggal dunia, 113 orang isolasi mandiri, 12 orang dalam perawatan, dan 393 orang dinyatakan sembuh.

"Kasus terbanyak terjadi di Kramatwatu dengan 24 kasus, Cikande 20 kasus, Kragilan 16 kasus, Bojonegara 8 kasus, dan sisanya tersebar di beberapa

kecamatan lainnya," katanya, Minggu (1/11/2020). Ia mengatakan, penambahan kasus tersebut, belum bisa ditentukan apakah akibat libur panjang atau bukan. Sebab, hasil laboratorium yang Dinkes peroleh berdasarkan pelacakan pekan lalu sebelum libur panjang.

Banyaknya pasien Covid-19 yang sembuh tak terlepas dari peran para tenaga medis. Selain itu, juga didorong dari kekuatan imun pasien.

Agus mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Masyarakat diimbau untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Dikatakan Agus, pihaknya terus melakukan pelacakan pada pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Supaya, dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (Qomat)

SKB CPNS Kabupaten Serang Terapkan Protokol Kesehatan

Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Serang pada Kamis 8 Oktober 2020 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Itu untuk memastikan tidak adanya penyebaran Covid-19.

Usai melakukan SKB, seluruh panitia penyelenggara dilakukan swab. Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi panitia dalam keadaan sehat usai tiga hari menggelar SKB.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang, Mohamad Ishak Abdul Rouf mengatakan, total panitia yang diswab ada 63 orang. Tes tersebut dilakukan untuk antisipasi karena mereka sudah bersentuhan dengan masyarakat.

"Jaga-jaga saja karena kita sudah bersentuhan dengan masyarakat antisipasi takut ada yang kena (Covid), untuk kesehatan kita semua," ujarnya.

Ishak mengatakan, saat ini kondisi panitia sehat semua. Sebab walau pun ada peserta yang positif namun dalam pelaksanaannya tetap menggunakan protokol ketat dan tidak bersentuhan.

"Panitia 86 sehat semua Alhamdulillah. (Peserta positif) Langsung dia dengan protokol ketat dengan APD (Alat Pelindung Diri) dikawal ke ruang isolasi," katanya.

Peserta yang positif itu diketahui berdasarkan pengakuannya sendiri. Peserta tersebut sebelum tes sudah menjalani swab dan rapid lebih dulu. Namun berdasarkan keterangan peserta, ia dalam kondisi sudah hampir sembuh. "Tapi tetap diperlakukan sama (tes di ruang isolasi atau terpisah)," ucapnya. (Amrin)



Antisipasi Banjir, Pemkab Serang Siap Sukseskan Program FMSRB

Pemerintah Kabupaten Serang menyambut baik program Flood Management Selected River Basins (FMSRB) dari pemerintahan pusat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bidang Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Serang melalui sumber dana FMSRB Loan APDB tahun 2020.

“Program ini semuanya sudah berjalan 1 tahun, ini tahun yang kedua. Rencananya program ini akan diguyurkan oleh pemerintah pusat sampai pada tahun 2022. Untuk pengerjaan fisiknya sendiri baru di tahun ini. Kemarin baru perencanaannya,” kata Kabid SDA DPUPR Kabupaten Serang, Moch Ronny Natadipraja, Rabu (4/11/2020).

Ia menjelaskan program-program pengelolaan risiko banjir FMSRB bertujuan untuk meningkatkan kesiapan para pemangku kepentingan dalam mengelola dan mengurangi risiko banjir melalui pendekatan pengelolaan banjir terpadu di wilayah sungai.

Ia menjelaskan ada empat sasaran dari Program FMSRB, pertama meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan risiko banjir; kedua meningkatnya kualitas pengelolaan lahan dan infrastruktur pengendali banjir; ketiga meningkatnya kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat; serta keempat meningkatnya kualitas koordinasi penyusunan kebijakan dan pengelolaan risiko banjir di tingkat nasional.

“Kita sudah melakukan penanganan maksimal agar tidak banjir tapi kan yang namanya alam tak bisa diprediksi ketika terjadi banjir yang kita persiapkan diri,” ucapnya.

Menurutnya pelaksanaan pengelolaan risiko banjir pada program FMSRB tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga intervensi nonfisik dengan upaya mengubah paradigma dan kegiatan yang berorientasi pada pengendalian banjir yang meliputi cara-cara fisik menjadi berorientasi manajemen banjir yang terintegrasi.

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan, serta konstruksi untuk mitigasi dampak negatif banjir, sehingga peningkatan kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam program ini.

“Bentuk dukungan kita adalah kita melaksanakan setiap SOP (Standar Operasional Prosedur) Juklak (petunjuk pelaksanaan) Juknis (petunjuk teknis) yang diberikan pemerintah pusat. Yang kita lakukan antara lain adalah kita membuat master plan atau rencana induk penanggulangan banjir penanggulangan risiko banjir yang ada di Kabupaten Serang,” kata Ronny.

Lalu, pihaknya merencanakan pembuatan sistem drainase di setiap daerah di setiap desa yang ada di Kabupaten Serang. “Rencana tersebut melibatkan peran serta dan kontribusi masyarakat. Dan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik pembangunan infrastruktur drainase itu sendiri.”

Mulai dari pelaksanaan bimbingan teknis atau edukasi terhadap masyarakat yang berkenaan dengan perencanaan maupun cara pengelolaan dan pelaksanaan. “Selain itu juga kita membuat jalan-jalan evakuasi saat terjadi banjir,” ujarnya. (Qomat)



Musim Penghujan, Sekda Minta Edukasi Masyarakat

Memasuki musim penghujan, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk waspada. Kemudian, juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat.

“Sekarang sudah memasuki peralihan musim dan terjadi perubahan cuaca sehingga semua pihak harus mulai memperhatikan kesehatan dan lingkungannya,” ujarnya, Minggu (8/11/2020).

Tak hanya waspada, Sekda juga meminta OPD yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat. Seperti Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Serang agar segera berkoordinasi dengan para petani.

Ia mengatakan, para petani jangan sampai salah jadwal tanam yang bisa mengakibatkan kerugian. “Untuk mengantisipasi pertanian kita sudah minta Distan melakukan pembinaan dan melakukan penyuluhan kepada para petani terkait pola tanam,” ujarnya.

Kemudian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang agar terus memberikan edukasi kepada warga terkait mitigasi bencana terutama terhadap daerah-daerah yang rawan bencana. “Di perubahan ini kita tidak ada kegiatan pembangunan fisik yang berkaitan dengan antisipasi kebencanaan,” paparnya.

Namun Entus meyakini jika masyarakat sudah bersiap diri setiap memasuki musim penghujan terutama terhadap bencana banjir.

“Mudah-mudahan tidak terjadi bencana apapun di Kabupaten Serang disaat peralihan musim dari kemarau ke penghujan.

Untuk daerah-daerah yang sering terjadi banjir kita dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus berupaya mencari solusi agar daerah-daerah tersebut tidak banjir lagi,” tegasnya. (Amrin)



Bapenda Optimistis Target Tetap Tercapai

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang di bawah kepemimpinan Deddy Setiadi dan Sekretarisnya Arif Roikhan memastikan semua pelayanan pajak daerah berjalan dengan baik walaupun di tengah penyebaran virus korona atau Covid-19.

Beberapa sektor penerimaan pajak daerah cukup terdampak dengan adanya penyebaran Covid-19 terutama penerimaan pajak dari sektor perhotelan dan restoran. Namun dengan upaya-upaya yang dilakukan Bapenda, penerimaan pajak daerah membaik karena realisasinya mendekati target yang telah ditetapkan untuk setiap triwulannya. "Alhamdulillah sejauh ini pelayanan pajak tetap berjalan. Realisasinya juga bagus, memang kita ada penurunan target sebesar Rp49 miliar karena ada Covid-19 dari Rp426 miliar menjadi Rp378 miliar," kata Deddy.

Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang salah satunya melakukan penagihan pembayaran pajak, Bapenda melakukan beberapa inovasi agar para wajib pajak (WP) tetap membayar kewajibannya dengan cara menghubungi langsung dan menyampaikannya melalui email.

Tidak hanya itu, dengan persiapan yang ketat, petugas Bapenda juga turun langsung ke lapangan untuk memeriksa meter air untuk mengetahui penggunaan air bawah tanah dan besaran pajak yang harus dibayarkan. "Petugas tetap ada yang turun ke lapangan tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan," tuturnya.

Sedangkan, terkait dengan penerapan new normal, Bapenda berkomitmen untuk meningkatkan upayanya dalam menggali dan menagih pajak daerah. "Memang ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan seperti penagihan PBB menggunakan moling (mobil keliling) tapi dengan adanya new normal ini akan kita akan operasikan lagi," paparnya.

Kegiatan moling sendiri dinilai sangat efektif untuk melakukan penagihan PBB-P2 karena masyarakat

sangat terbantu dengan kegiatan tersebut. "Jadi masyarakat merasa sangat terbantu karena lebih dekat. Kalau sudah dioperasikan tetap kita terapkan protokol Covid-19 untuk menghindari kerumunan," tuturnya.

Realisasi PBB-P2 sendiri memang masih minim namun dipastikan akan tercapai dengan baik karena seperti pada tahun-tahun sebelumnya WP akan membayarkan pajaknya saat akan jatuh tempo. "Untuk SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) sudah kita didistribusikan lebih awal. Insya Allah semua kegiatan yang terkait pajak akan dioptimalkan lagi saat new normal, baik itu penagihan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian potensi pajak maupun pembinaan," katanya.

Bupati Serang Rt Tatu Chasanah sendiri sempat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pelayanan pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang untuk memastikan pelayanan pajak daerah berjalan dengan baik. Tatu yang didampingi Kepala Bapenda Kabupaten Serang Deddy Setiadi melihat langsung pelayanan di loket bank BJB "Teman-teman (petugas BJB-red) harus tetap sehat karena nyawanya Kabupaten Serang ada di sini (Bapenda-red)," kata Tatu sebelum berpamitan dengan petugas bank BJB.

Ia memastikan, pelayanan pajak di Bapenda tetap berjalan dengan tetap menerapkan protokol Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Kita memastikan pelayanan di dalam (loket-red) dan Alhamdulillah semua protokol kesehatan dilaksanakan. Tadi (kemarin-red) saya juga menanyakan kepada petugas, apakah ada persoalan atau tidak dan jawabnya tidak ada," ujarnya.

Tatu menegaskan, Pemkab Serang sangat siap untuk menerapkan new normal karena selama ini di Kabupaten Serang kegiatan-kegiatan masyarakat tidak ditutup seluruhnya dan hanya menerapkan protokol Covid-19 dalam setiap kegiatan masyarakat. "Memang untuk kunjungan WP (wajib pajak) ke sini (Bapenda-red) agak berkurang. Mudah-mudahan dengan adanya new normal ini semua berjalan dengan baik," tuturnya. (Qomat)



Amankan SPBE, Pemkab Serang Perkuat Bug Bounty Program

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus memacu percepatan transformasi digital guna mewujudkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga tingkat kecamatan. Hal itu dapat terwujud, dengan ditunjang infrastruktur atau jaringan internet yang memadai.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya mengatakan, pelaksanaan SPBE atas dasar hukum Perpres 95/2018 tentang SPBE Platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah.

"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE," ujar Anas pada Rapat Rekonsiliasi pelaksanaan kegiatan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat kecamatan bertempat di Aula KH. Syam'un Setda Kabupaten Serang pada Senin, 30 November 2020.

Dalam rapat tersebut dihadiri perwakilan dari 29 kecamatan. Anas menyebutkan, dengan digelarnya rapat rekonsiliasi mengingat kondisi saat ini dari total 29 kecamatan, terdapat 2 website kecamatan yang aktif yakni Kecamatan Cikande dan Kecamatan Kibin.

Diketahui, rapat rekonsiliasi agar diketahui kendala atau keadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di setiap kecamatan. Sehingga kedepan akan dibangun tower, bandwidth dan semua sarana prasarana jaringan internet yang menginduk ke

pusat yaitu Diskominfo guna mewujudkan SPBE.

"SPBE bertujuan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE,"terang Anas.

Anas menyebutkan, dalam pelaksanaan SPBE di Pemkab Serang diperkuat atas dasar hukum Perbup No.36 Tahun 2019 tentang Tata kelola SPBE dan SK Bupati No.555/Kep.475-Huk.DISKOMINFO/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Serang.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Telematika pada Diskominfo Kabupaten Serang, Hotman Siregar menambahkan, bahwa isu strategis Kabupaten Serang meliputi Information Communication Technology (ICT) yang terintegrasi, penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet, implementasi Government/SPBE dan pusat data.

"Kemudian integrasi kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi informasi, sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggara pemerintah daerah,"ujarnya.

Dia menjelaskan atas capaian SPBE yakni pelayanan terhadap masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, pemetaan solusi tepat guna, dan akurasi data dalam pengambilan keputusan.

"Sebagai lanjutannya pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan informasi, memudahkan masyarakat, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat, informasi kepada masyarakat serta efisiensi pemerintahan,"papar Hotman. (Qomat)



Wujudkan SPBE, Pemkab Serang Percepat Transformasi Digital

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus memacu percepatan transformasi digital guna mewujudkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga tingkat kecamatan. Hal itu dapat terwujud, dengan ditunjang infrastruktur atau jaringan internet yang memadai.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya mengatakan, pelaksanaan SPBE atas dasar hukum Perpres 95/2018 tentang SPBE Platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah.

“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE,” ujar Anas pada Rapat Rekonsiliasi pelaksanaan kegiatan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat kecamatan bertempat di Aula KH. Syam’un Setda Kabupaten Serang pada Senin, 30 November 2020.

Dalam rapat tersebut dihadiri perwakilan dari 29 kecamatan. Anas menyebutkan, dengan digelarnya rapat rekonsiliasi mengingat kondisi saat ini dari total 29 kecamatan, terdapat 2 website kecamatan yang aktif yakni Kecamatan Cikande dan Kecamatan Kibin.

Diketahui, rapat rekonsiliasi agar diketahui kendala atau keadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di setiap kecamatan. Sehingga kedepan akan dibangun tower, bandwidth dan semua sarana prasarana jaringan internet yang menginduk ke pusat yaitu Diskominfo guna mewujudkan SPBE.

“SPBE bertujuan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE,” terang Anas.

Anas menyebutkan, dalam pelaksanaan SPBE di Pemkab Serang diperkuat atas dasar hukum Perbup No.36 Tahun 2019 tentang Tata kelola SPBE dan SK Bupati No.555/Kep.475-Huk.DISKOMINFO/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Serang.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Telematika pada Diskominfo Kabupaten Serang, Hotman Siregar menambahkan, bahwa isu strategis Kabupaten Serang meliputi Information Communication Technology (ICT) yang terintegrasi, penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet, implementasi Government/SPBE dan pusat data.

“Kemudian integrasi kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi informasi, sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggara pemerintah daerah,” ujarnya.

Dia menjelaskan atas capaian SPBE yakni pelayanan terhadap masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, pemetaan solusi tepat guna, dan akurasi data dalam pengambilan keputusan.

“Sebagai lanjutannya pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan informasi, memudahkan masyarakat, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat, informasi kepada masyarakat serta efisiensi pemerintahan,” papar Hotman. (Qomat)



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus meningkatkan profesionalisme kinerja sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) dalam pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).

Hal itu guna mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Agar penerapan SPBE atau e-Government mencapai tujuan, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE baik di pusat maupun di daerah,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri, saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di ikuti puluhan ASN di salah satu hotel di Kota Tangerang pada Selasa (25/08/2020).

Bimtek pengelolaan TIK di lingkungan OPD Kabupaten Serang digelar Bidang Telematika Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo).

Evaluasi SPBE, lanjut Entus, merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pusat maupun daerah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan.

“Evaluasi SPBE harus dapat dilaksanakan secara optimal oleh Pemkab Serang, maka itu memerlukan sinergitas antara OPD-OPD sebagai evaluator internal seperti Bappeda Bagian Organisasi, Inspektorat dan Diskominfo agar berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dikatakan Entus, SPBE memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel dalam pelayanan kepada masyarakat secara

Tunjang SPBE, Pemkab Serang Tingkatkan SDM ASN

luas.

Melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik bisa menekan penyalahgunaan kewenangan.

“Penyalahgunaan baik bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme,” tegas Entus.

Disamping itu, Entus mengajak pada masa pandemi covid-19 harus dijadikan momentum melakukan percepatan transformasi digital sesuai yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan lima hal, salah satunya persiapan sumber daya manusia tyalenta digital.

“Hal itu sejalan dengan yang dilaksanans saat bimtek SPBE,” tuturnya.

Pada sosialisasi dan Bimtek SPBE menghadirkan narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Ugi Cahyo Setiono dan Sigit Supriyanto, dan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo, Bambang Dwi Anggono.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Telematika pada Diskominfo Kabupaten Serang, Hotman Siregar mengatakan, bahwa tujuan dilaksanakannya bimtek guna meningkatkan profesionalisme kinerja SDM ASN dalam pemanfaatan TIK, terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien berdasarkan strategi pengembangan e-Government, mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara elektronik berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Diharapkan juga menghasilkan Out come yang positif terhadap pengelola TIK sebagai administrator di tiap OPD nya masing-masing dan optimalisasi untuk berkoordinasi pengelolaan yang berhubungan dengan TIK bersama Diskominfo Kabupaten Serang,” tuturnya. (Qomat)



KULI BANGUNAN

Oleh : Dede Kodrat Alwajir
Direktur Spectrum Data Indonesia

Apakah yang anda pikirkan saat melihat sebuah rumah mewah. Pastinya, yang terlintas dalam pikiran kita adalah siapa pemilik rumah itu. Kita terkesima dengan plafon yang indah, dihiasi bunga yang tertata secara rapih. Ditambah lagi dengan suasana depan rumah yang menghipnotis setiap para tamu yang datang. Susunan bangunan yang begitu baik, pernak-pernik hiasan di dalam sungguh menghilangkan rasa kepenatan. Temaramnya lampu di ruang tamu semakin melupakan kita akan elemen yang selama ini menjadi bagian terpenting dalam menghadirkan sebuah bangunan yang berkesan.

Godaan hasrat yang pendek melambungkan angan-angan untuk berkesimpulan memiliki. Kita sudah lupa bahwa yang menghidrarkannya adalah proses banyak tangan. Siapakah orang itu? mereka adalah para kuli bangunan yang terlupakan. pekerjaannya meramu semen dan pasir lalu mencampurkan air untuk menjadikan sebuah acian yang merekatkan batu bata. Jadilah sebuah susunan yang kemudian menjadi tembok.

Dirinya tidak pernah protes membuat bangunan itu. Dalam kondisi kepanasan atau kedinginan. Kadang-kadang kelelahan karena mandornya lupa bahwa ia belum makan siang. Tapi terus saja ia bekerja untuk menyelesaikan target bangunan yang sudah disepakati dengan pemiliknya. Dalam pikirannya hanya satu tujuan, selasainya bangunan. Sesekali memang ia mengeluh. Tapi keluhannya itu ia tekan. Bahkan hasrat perlawanannya ia kalahkan untuk ketundukan kepada sebuah tujuan. Walau seringkali mandornya tidak mememanusiakannya.

Kuli bangunan itu ditarget menyelesaikan banyak pekerjaan, tapi perhatian terhadapnya tidak pernah sebanding dengan apa yang dilakukan. Mandornya tidak tahu menahu akan kondisi internalnya. Banyak kemungkinan dapat terjadi, bisa saja dirumahnya ada anak-anak yang sedang menunggu uang untuk bayaran sekolahnya. Keluarganya menunggu beras untuk menyambung hidup. Tapi lagi-lagi itu ia singkirkan, ia selesaikan semua pekerjaan. Diantara mereka kemudian kembali mengambil sebuah pasir, mengaduk semen dan memberi air lalu jadi kembali sebuah acian

yang terus ia gunakan untuk membuat bangunan. Tak pernah lagi ia mengeluh. bahkan tidak pernah lagi ia melawan. Amarahnya justru dilampiaskan untuk menyelesaikan tugasnya.

Kesabaran membuah hasil sedikit demi sedikit

Bangunan itu kemudian rampung. Telah meneduhi sebuah keluarga yang bahagia. Mereka terlindung dari angin, hujan dan gangguan binatang. Kemudian si kuli bangunan itu, tersenyum merasa bahagia, ia puas telah menyelesaikan sebuah bangunan. Walau uang sebagai balas jasa keringatnya tidak dihargai terlalu besar. Kepuasan hatinya menjadi obat penawar, walau tak pernah ia diundang kembali untuk sekedar ngobrol bertamu dan bercengkrama dalam bangunan yang ia bereskan dengan banyak pengorbanan. Mandorlah yang menikmati banyak keuntungan, sebagai bayaran dari keringat dan keluh kesah para kuli bangunan, ironis!

Teori Maslow

Dalam pandangan maslow, manusia memiliki lima kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap. Diantaranya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan self aktualisasi. Banyak sekali orang yang tertipu dengan menilai sesuatu dari ketiga indikator awal, yaitu fisiologis, keamanan dan sosial. Manusia tidak hanya membutuhkan itu, justru kondisi kritis mereka adalah saat ketiga kebutuhan itu berhasil ia penuhi, lalu beranjak kepada kebutuhan yang keempat yaitu penghargaan.

Menghargai adalah warisan Nabi yang sangat mahal. Bahkan karena gara-gara kurang menghargai Rasulullah pernah ditegur oleh Allah. Seorang sahabat yang tua serta buta, Ummi Maktum, pernah mendatangi rasulullah saat Rasul berdakwah kepada para pembesar Qurais. Pada saat itu ummi maktum ingin mendapatkan pelajaran dari rasulullah. Sayang, waktu itu rasul menganggap para pembesar lebih utama untuk dihargai dari pada ummi maktum yang buta. Kemudian dengan cepat, Allah swt, menegur Rasul bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan para pembesar itu dengan seorang yang buta.

Penghargaan itu adalah masalah yang sepele, tapi akibatnya sangat besar terhadap apapun. Siapapun yang ingin menjadi orang besar harus memahami bahwa setiap manusia yang berada disekeliling membutuhkan penghargaan. Penghargaan ini

bukan hanya soal memuji dengan membabi buta. Penghargaan merupakan hasil penjumlahan dari kerendahan hati dan usaha menjadikan diri agar bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang dasar dan kecil tapi menentukan kebesaran seseorang. Jika diri kita tidak suka menghargai, walau pun kita dianggap besar, sesungguhnya kebesaran kita hanyalah senilai kulit bawang.

Belajar Memberi Kesan

Keikhlasan para kuli bangunan dan teori maslow memiliki kaitan yang sangat tinggi. Menggelitik, kita yang sudah bertahun-tahun menempati rumah sendiri belum tentu tahu siapa kuli bangunan yang bekerja siang malam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jika pun ada, saya tidak begitu yakin bila pemilik rumah menghargai jerih payah para kuli bangunan itu. Sekedar mengingat namanya atau mengajak bersua dalam rumah yang pernah dibangun dari tangannya. Bayangkanlah diri kita sebagai kuli bangunan. Apa yang terjadi, saya sangat yakin kita akan banyak tersadar. Walau sipemilik dan orang seisi rumah tidak banyak menghargai dan melupakan, tapi justru para tamu dan orang yang sering lewat depan rumah yang ternyata banyak mendapatkan kesan. Yang terlupakan tapi penghasil ribuan kesan.

Banyak sekali orang tersadar akan sesuatu karena kesan yang didapatkannya. Mereka hanya perlu sedikit penghargaan dengan kita menghormatinya secara tulus dan mendalam. Bukan usaha formal untuk menarik hatinya lalu ikut dengan keinginan kita setelah selesai cukuplah sudah hubungan semuanya diputuskan. Tak ada lagi tegur sapa.

Barangkali ini adalah sebuah masukan bagi para pemangku kepentingan, pemilik kebijakan dan para pemburu kekuasaan. Hadirlah sepenuh hati bagi siapapun, tanamkanlah kesan mendalam, bukan hanya untuk mengambil manfaat darinya. Tapi kesan harus hadir untuk mengikat hati agar kita saling bersua dalam kebenaran. Bukan saling menghujat dalam perpecahan.



TIPS BERSEPEDA JARAK JAUH UNTUK PEMULA

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk berolahraga dengan suasana yang menyenangkan. Sebagian orang memilih bersepeda, karena selain membuat badan bugar, banyak hal menarik yang bisa ditemui dalam perjalanan saat bersepeda. Bersepeda juga merupakan olahraga yang membuat pikiran segar karena kita berinteraksi langsung dengan alam.

Semakin lama menggeluti olahraga sepeda, biasanya seseorang akan merasa lebih tertantang melakukan perjalanan jarak jauh. Dengan jarak yang bertambah, tentunya tenaga pun akan lebih terkuras. Untuk para pemula, ini dia tips bersepeda jarak jauh yang bisa dicoba.



Konsumsi makanan berserat

Penting untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum mengayuh pedal sepeda. Jangan sampai bersepeda dengan perut kosong atau kekenyangan. Sebaiknya konsumsi makanan tinggi serat, seperti buah-buahan di malam hari. Serat yang tinggi, apalagi kaya mineral, akan menjadi suplemen alami untuk pasokan energi.

Kayuh sepeda dengan teknik yang benar

Cara yang salah dalam mengayuh sepeda, bisa menjadi faktor utama yang menguras energi dengan cepat. Maka itu, perlu mengayuh sepeda dengan teknik yang benar, yaitu 70 persen dari detak jantung. Untuk menentukan angka ini memang harus menggunakan alat detak jantung. Namun, kita bisa mengeceknya dengan cara termudah yaitu jika kita tak bisa menyelesaikan satu kalimat saat berbicara, itu tandanya kita terlalu ngoyo saat mengayuh.

Atur posisi gir sepeda

Performa pesepeda dipengaruhi oleh gir. Atur gir sesuai kenyamanan diri sendiri. Jika kayuhan terasa

berat, segera ganti gir ke posisi yang lebih ringan agar tidak menyiksa diri sendiri.

Mengetahui kemampuan diri sendiri

Dalam bersepeda jarak jauh, soal persiapan fisik maupun alat memang penting. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah mengetahui kemampuan diri sendiri. Bersepeda jarak jauh memang tak mudah, perlu banyak berlatih. Namun juga perlu untuk mengendalikan diri agar tidak berambisi mengayuh begitu cepat di awal yang berakibat kelelahan saat baru setengah perjalanan. Lalu, jangan memaksakan diri untuk mencapai target jika tubuh mulai melemah.

Itu dia beberapa tips bersepeda jarak jauh untuk pemula. Teruslah berlatih agar progressnya meningkat dengan baik. Ingin merambah olahraga bersepeda? #MulaiAjaDulu dari Tokopedia. Di Tokopedia, ada aneka sepeda baru/bekas yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, dari sepeda balap, sepeda gunung atau pun sepeda fixie terbaru. Jadi, sudah siap untuk mengayuh pedal sepedamu?



PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG



Sumpah Pemuda
BERSATU BANGKIT

AYO PAKE MASKER

SELAMAT HARI SUMPAAH PEMUDA

28 OKTOBER 2020



Drs. ADE ARIYANTO, M.Si
Pjs. Bupati Serang



Drs. H. Tb. Entus Mahmud S, M.Si
Sekda Kab. Serang